

SEJARAH LOKALISASI SEMAMPIR KOTA KEDIRI TAHUN 1960 – 2016

RAHMADHANI HENDRA SUKMANA

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: rahmadhanihendra6@gmail.com

Agus Suprijono

S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Prostitusi merupakan perilaku menyimpang dan dapat mengakibatkan penyakit sosial yang berada di masyarakat. Praktik prostitusi sering terjadi dan berada di negara se-dunia salah satunya berada di Indonesia. Profesi prostitusi di lingkungan masyarakat yang berada di Indonesia sudah sejak lama keberadaannya. Mulai sejak jaman kolonialisme Belanda hingga Indonesia Merdeka, prostitusi semakin berkembang. Perkembangan prostitusi di Indonesia telah menyebar di penjuru – penjuru kota maupun desa. Perkembangan prostitusi di Indonesia ini salah satunya juga berada di kelurahan Semampir, kecamatan Kota, Kota Kediri.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana sejarah kompleks prostitusi di lokalisasi semampir Kota Kediri tahun 1960?. (2) Bagaimana dampak penutupan kompleks prostitusi di lokalisasi Semampir kota Kediri tahun 1998 hingga proses penggusuran tahun 2016? Dalam melakukan analisis terhadap data – data yang sudah diperoleh digunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Hasil dari penelitian ini ialah prostitusi di Kota Kediri berawal dari di taman hiburan alun – alun Kediri. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1960 terdapat kebijakan walikota Kediri untuk memindahkan para prostitusi liar di Kelurahan Semampir. Pada tahun 1960 keatas para prostitusi mengalami perkembangan di kompleks lokalisasi Semampir. Perkembangan kompleks pelacuran di kelurahan Semampir terjadi penutupan pada tahun 1998 oleh PERDA Kotamadya. Setelah penutupan kompleks prostitusi di kelurahan Semampir, para warga lokalisasi Semampir secara illegal berdiri sendiri. Penutupan lokalisasi di kelurahan Semampir secara illegal itu mengalami perkembangan lagi seperti sebelumnya. Pada akhirnya walikota Kediri yang dijabat oleh Bapak Abdullah Abu Bakar. SE memperoleh kebijakan dengan menggusur kompleks lokalisasi Semampir pada tahun 2016.

Kata Kunci: Sejarah Komplek Lokalisasi Prostitusi di Semampir Kota Kediri.

Abstract

Prostitution is a deviant behavior and can cause social illness in the community. The practice of prostitution often occurs and is located in countries in the world, one of them in Indonesia. Prostitution profession in the community that has been in Indonesia for a long time. Starting from the days of Dutch colonialism to Indonesia's independence, prostitution was growing. The development of prostitution in Indonesia has spread to all cities and villages. The development of prostitution in Indonesia is one of them also in the village of Semampir, the city of Kediri.

The problems studied in this study are: (1) What is the history of the prostitution complex in the localization of the city of Kediri in 1960?, (2) How, the impact of the closure of the prostitution complex in Semampir town in Kediri in 1998 until the eviction process in 2016?. In conducting an analysis of the data that has been obtained used historical methods that include heuristics, criticism, interpretation, and historiography.

The results of this study are prostitution in the City of Kediri starting from the Kediri square amusement park. As time went on in 1960 there was a policy of the mayor of Kediri to move illegal prostitution in the Semampir Village. In 1960 the prostitutes experienced development in the localization complex. The development of the prostitution complex in Semampir was closed in 1998 by PERDA Municipality. After the closure of the prostitution complex in the Kelurahan Semampir, the residents localized Semampir illegally standing alone. The closure of localization in the Semampir Village illegally experienced further development as before. In the end the mayor of Kediri was held by Mr. Abdullah Abu Bakar. SE obtained a policy by displacing the Semampir localization complex in 2016.

Keywords: History of Prostitution Localization Complex in Semampir City of Kediri.

PENDAHULUAN

Prostitusi dari sebagian besar pada kalangan masyarakat sekitar dapat dikategorikan sebagai penyebab timbulnya penyakit sosial atau disebut patologi sosial.¹ Praktik pelacuran sering terjadi dan berada di negara-negara di dunia yang salah satunya terdapat di Indonesia. Pada umumnya, prostitusi dianggap sebagai profesi dalam pekerjaan sosial² atau tindakan melakukan penyimpangan yang paling lama jika dibandingkan dengan profesi lain meskipun status yang terkandung didalamnya adalah tidak sah baik itu dalam norma-norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Praktik prostitusi yang berkembang dalam suatu perkotaan merupakan suatu hal yang secara eksplisit berfungsi sebagai penambah pendapatan bagi pemerintah daerah.

Pada umumnya para pekerja prostitusi hanya mengedepankan profesinya sebagai penyedia jasa prostitusi untuk mencukupi kebutuhan jasmaninya, selain mereka bekerja sebagai prostitusi untuk mencukupi kehidupannya setiap bulannya, mereka wajib membayar berupa pungutan pajak dari Pemerintah Daerah.

Pendapatan Pemerintah Daerah dari lokalisasi salah satunya berupa sumbangan yang didapatkan dari pungutan. Pungutan yang ditarik oleh Pemerintah Daerah berupa hasil pungutan dari lokalisasi yang berbentuk sumbangan pajak retribusi daerah. Pemberlakuan pajak yang didapatkan dari lokalisasi yang sudah diresmikan dan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat.

Perkembangan prostitusi bukan hanya sebagai penambah pendapatan bagi suatu daerah. Prostitusi juga dapat mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi serta dapat mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat di suatu daerah. Keberadaan lokalisasi mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi seseorang. Selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan, keberadaan prostitusi atau wanita penghibur juga dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat di suatu daerah.

Seiring berkembangnya teknologi dan budaya dalam masyarakat, prostitusi telah mengalami perkembangan baik dari bentuk prostitusi ataupun pola yang digunakan dalam praktek prostitusinya secara berdampingan.

Keberadaan prostitusi di Indonesia terutama di Jawa memiliki cerita sejarah yang panjang. Sejak masa kerajaan Mataram, prostitusi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan masyarakat. Para wanita tuna susila sengaja datang ke ibukota kerajaan dan menyediakan jasa pelayanan seksual bagi para prajurit atau kaum bangsawan dan juga golongan pedagang.³

Terdapatnya komersialisasi seks sejak masa penjajahan di Indonesia itupun masih sering terjadi. Bentuk industri seks yang sampai sekarang ini lebih terorganisir berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi itulah terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa. Pada umumnya aktivitas prostitusi tersebut berkembang di daerah sekitar pelabuhan - pelabuhan yang berada di nusantara. Pemuasan kebutuhan khusus untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke nusantara pada kala itu. Dari semula isu tersebut telah menimbulkan banyak dilema bagi penduduk pribumi maupun non-pribumi. Di satu sisi, banyaknya lelaki bujangan yang dibawa pengusaha atau dikirim oleh pemerintah kolonial untuk datang ke Indonesia, telah menyebabkan adanya permintaan kebutuhan khusus tersebut. Kondisi tersebut ditunjang pula oleh masyarakat yang menjadikan aktivitas seks pada masa itu memang tersedia, karena banyak keluarga pribumi yang menjual anak perempuannya untuk mendapat imbalan materi dari para pelanggan baru seperti para lelaki bujangan atau lelaki hidung belang.⁴

Praktik prostitusi yang terdapat di Indonesia dari masa kerajaan Jawa hingga masa penjajahan kolonialisme Belanda bahkan sampai Indonesia merdeka tahun 1945 masih terdapat industri rumah bordil, seperti halnya yang terdapat di kota Kediri. Di kota ini terdapat industri rokok kretek terbesar se-Asia Tenggara yang mulai berdiri sejak tahun 1958 tersebut menjadikan pendapatan tersendiri bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Kediri.

Terdapatnya industrialisasi pabrik rokok di Kota Kediri dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kediri dan sekitarnya. Industrialisasi rokok di kota Kediri ini menjadi daya tarik bagi masyarakat kota lain untuk bekerja mencari pendapatan di pabrik rokok. Minat masyarakat untuk bekerja sebagai buruh di pabrik rokok dikarenakan pendapatan mereka sebagai buruh pabrik rokok tersebut sangat tinggi, sedangkan produksi di pabrik rokok tersebut setiap harinya selalu menghasilkan ratusan ribu lintingan rokok yang sudah dikemas di kardus rokok dan dilabeli cukai yang nantinya akan dikirimkan di berbagai penjuru kota maupun desa yang ada di Indonesia serta ada yang di ekspor keluar negeri.

Perkembangan industrialisasi pabrik rokok di Jawa Timur Kota Kediri ini, juga terdapat industri rumah bordil yang bertempat di kelurahan Semampir kota Kediri. Berdirinya industrialisasi pabrik rokok gudang garam hanya berselisih dua tahun dengan berdirinya lokalisasi rumah bordil di Semampir. Mulai sejak tahun 1958 berdirinya industri pabrik rokok dan 1960 berdirinya

¹ Patologi Sosial merupakan suatu gejala atau fenomena dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintang pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibat bahwa peningkatan sosial patah sama sekali. Lihat: B. Simandjuntak, *beberapa Aspek Patologi Sosial*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1981), Hlm.17.

² Pekerjaan sosial yaitu suatu profesi atau pekerjaan yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya

dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Lihat: Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), Hlm.3.

³ Nur Syam, *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm 80.

⁴ Hull, T., Sulistyanyingsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997, hlm.3-4.

industri rumah bordil. Keberadaan industri rumah bordil di Semampir sebagai kompleks prostitusi sejak tahun 1960 tersebut berdekatan dengan lokasi industrialisasi pabrik rokok gudang garam. Namun seiring keberadaan industri rumah bordil juga menimbulkan beberapa dampak.

Dampak dari praktik prostitusi yang dilakukan oleh wanita tuna susila di Lokalisasi Semampir tersebut, salah satu akibatnya berpengaruh terhadap psikologi anak didik yang masih duduk di bangku sekolah. Pengaruh prostitusi bagi anak didik dapat merusak moral dan karakter terhadap cara berperilakunya. Penyebab rusaknya moral dan karakter anak tersebut dikarenakan terjadi kecenderungan ke arah penyimpangan sosial seperti terdapatnya industri rumah bordil yang dijadikan sebagai praktik prostitusi dan pelacuran.

Sebagian besar masyarakat di Kota Kediri menganggap bahwa profesi wanita tuna susila hanya memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa serta dapat merusak nama baik dari Kota Kediri. Keberadaan lokalisasi Semampir yang terletak di Kelurahan Semampir Kota Kediri dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Masyarakat beranggapan bahwa keberadaan prostitusi selalu berkaitan dengan penyakit sosial yang hanya menimbulkan dampak buruk bagi daerah.

Pembahasan mengenai penyimpangan sosial dengan fokus kajian perkembangan prostitusi di lokalisasi Semampir Kota Kediri belum pernah diteliti oleh para peneliti-peneliti di Kota Kediri. Hal inilah yang mendorong minat penulis untuk meneliti permasalahan tersebut. Pembahasan mengenai lokalisasi Semampir sangat penting, karena praktik prostitusi menimbulkan dampak negatif bagi kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Dampak yang ditimbulkannya cenderung berpengaruh terhadap menurunnya minat dan semangat belajar anak didik. Selain itu, dampak lain adalah berpengaruh terhadap keharmonisan dan ketenteraman seseorang. Berbagai permasalahan muncul seperti perselingkuhan hingga perceraian.

METODE

A. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Dalam proses penelitian ini terdapat beberapa sumber yang sudah dikumpulkan. Pengumpulan sumber ini dengan tujuan untuk memperoleh data yang akan dipecahkan dalam fokus kajian Lokalisasi Semampir Tahun 1960 – 1998: Kajian Tentang Perkembangan Prostitusi Di Kota Kediri. Adapun langkah – langkah pengumpulan data yang sudah diperoleh berupa:

1. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan dalam proses penelitian ini berupa sumber arsip yang diperoleh dari kantor Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri yang berhubungan dengan Sertifikat hak milik aset lahan di Eks-Lokalisasi Semampir yang tertera atas nama Pemerintah Kota Kediri, serta pungutan pajak retribusi daerah yang di berlakukan untuk sewa lahan. Selain itu sumber primer yang diperoleh selanjutnya di Dinas Sosial Kota Kediri, peneliti memperoleh beberapa

surat seperti peraturan daerah atau (PERDA) Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Kediri dan dokumen arsip Keputusan Walikota Kediri tentang Tim Terpadu Penanganan Eks-Lokalisasi Semampir Kota Kediri tahun 2016, dan lampiran Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas yang menjelaskan Sosialisasi Penanganan Pasca Penutupan Eks Lokalisasi Semampir, dan dokumen arsip dari Gubernur Jawa Timur Nomor : 460/7705/031/2014 tentang Penanganan dan Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Jawa Timur, serta arsip Sekertariat Daerah Pemerintah Kota Kediri Nomor : 460/3029/419.50/2016 terkait Pemberitahuan Revitalisasi Aset Pemerintah Kota Kediri yang di tujuakan kepada Kelurahan Semampir, serta masih banyak arsip lainnya terkait proses eksekusi lokalisasi Eks-Semampir di Kota Kediri.

Pengumpulan sumber dokumen berupa arsip di beberapa lokasi tersebut memiliki tujuan tersendiri. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti bahwa didalam penelitian yang akan dikerjakan terbukti keaslian datanya mengenai arsip-arsip yang penulis gunakan dalam penelitian, sehingga tidak ada keraguan dalam proses analisisnya.

2. Sumber Sekunder

Jenis sumber sekunder ini merupakan sumber pendukung yang digunakan dalam penelitian seperti:

a) Artikel.

Pencarian data berupa sekumpulan artikel dalam penelitian ini yang diperoleh untuk mendukung kajian dalam pembahasan sejarah lokalisasi Semampir Kota Kediri Tahun 1960 – 2016. Sumber yang diperoleh dari artikel ini selanjutnya diolah dan dipadukan kepada kajian pembahasan. Adapun artikel yang sudah diperoleh seperti berita informasi dari internet tentang prostitusi di Kota Kediri.

b) Jurnal

Jurnal yang diakses dari FISIP Universitas Airlangga oleh Cemi Fitriani dengan kajian tentang Politik Prostitusi Kota Surabaya dengan study deskriptif: eksistensi Dolly. Juga terdapat Jurnal dari Winarno Jatmiko dengan kajian pelacuran dan penanggulangannya dalam prespektif politik hukum pidana.

c) Buku.

Adapun sumber pendukung dari buku yang dipakai dalam penelitian ini terdapat buku Kartini Kartono tentang Kajian Patologi Sosial, buku karangan Sarlito Wirawan Sarwono tentang Teori Psikologi Sosial, dan karangan Terence H. Hull tentang pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya. Dan masih banyak buku – buku lainnya yang peneliti peroleh dari perpustakaan sebagai data pendukung dalam penelitian.

3. Sumber Lisan

Sumber lisan ini diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini bertemu dengan Bu Dewi Sartika di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kediri. Proses wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara mendalam, karena sumber

informasi yang berhubungan dengan lokalisasi Semampir ini beliau banyak mengetahuinya.

Sumber lisan kedua diperoleh dari Mbah H. Spto Darmo. Proses pencarian sumber lisan berupa wawancara ini dilakukan di rumah beliau yang berada di Jalan Mayor Bismo kelurahan Semampir Kota Kediri. Keterkaitan peneliti dengan beliau ini karena Mbah H. Spto Darmo mengetahui riwayat para PSK yang masih liar hingga bertempat di Semampir. Teknik yang dilakukan dalam pencarian sumber lisan ini menggunakan metode wawancara mendalam. Penjelasan cerita yang disampaikan oleh beliau merupakan sumber lisan berupa teknik wawancara.

Sumber lisan ketiga diperoleh dari Bu Endang Sri Utami. Proses pencarian sumber lisan berupa wawancara ini dilakukan di rumah beliau yang berada didekat lokalisasi Semampir. Penjelasan dari Bu Endang Sri Utami ini tertuju pada PSK yang sudah bertempat di Kelurahan Semampir.

Sumber lisan keempat diperoleh dari Bapak Agus Karwiyanto. Beliau selaku Ketua RW 005 yang memegang RT lokalisasi Semampir. Dalam proses pencarian sumber lisan ini lebih terfokus pada aktivitas para PSKnya dan warga lokalisasi yang berada di lokalisasi Semampir. Metode yang dilakukan dalam wawancara ini menggunakan teknik wawancara mendalam.

Sumber lisan kelima diperoleh dari Mbak Rina selaku pegawai Satpol PP Kota Kediri. Perolehan hasil berupa wawancara ini lebih tertuju pada keamanan dan penertiban di komplek lokalisasi Semampir pada waktu mendekati proses pengurusan.

Sumber lisan keenam diperoleh dari Bapak Endro Laksono selaku intelkam pegawai di Polres Kediri Kota. Perolehan hasil berupa wawancara ini lebih tertuju pada keamanan dan penertiban di komplek lokalisasi Semampir pada waktu mendekati proses pengurusan.

B. Kritik (Menguji Sumber)

1. Intrinsik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menguji beberapa dokumen – dokumen penting yang sudah diperoleh serta dapat digunakan dalam memecahkan suatu persoalan didalam proses penelitian. Teknik menguji sumber ini menggunakan dokumen – dokumen seperti dokumen arsip berupa PERDA yang digunakan dalam menentukan peristiwa sejarah.

2. Ekstrinsik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menguji hasil yang sudah disampaikan orang melalui teknik wawancara mendalam. Tujuan dalam menentukan pengujian wawancara ini supaya terdapat kesamaan yang dibahas atau digunakan metode triangulasi data. Beberapa hasil yang telah diperoleh dari teknik wawancara ini dari beberapa orang selanjutnya dipecahkan dan disimpulkan.

C. Interpretasi

Langkah selanjutnya merupakan proses tahapan penafsiran. Interpretasi merupakan tahapan akhir dalam

proses penelitian. Dalam tahap ini digunakan untuk mencari sebuah relevansi dari sumber yang didapat dengan fakta yang telah ditemukan dan kemudian akan ditafsirkan. Penafsiran dilakukan dengan menggunakan pendekatan – pendekatan ilmu sosial dan konsep – konsep ilmu sosial lainnya juga dilibatkan dengan cara menganalisa segala aspek peristiwa dalam penelitian yang bisa menghubungkan antara satu fakta dengan fakta lain yang telah ditemukan dan kemudian melakukan tahap metode penulisan.

Pada proses penafsiran ini memasuki tahapan menganalisis sumber dengan cara menghubungkan beberapa sumber primer, sumber sekunder dan sumber lisan. Pada tahapan interpretasi ini merupakan tindakan menganalisis sumber dokumen arsip dan sumber dokumen wawancara. Hasil dari menganalisis sumber ini jika sumber – sumber bisa dipercaya maka teknik selanjutnya masuk kepada metode penulisan atau historiografi.

D. Historiografi

Dalam penulisan sejarah ini merupakan suatu kegiatan intelektual dan suatu cara untuk mengkaji pembahasan yang dituangkan dalam penulisan sejarah sebagai disiplin teori. Ketika penelitian memasuki tahapan penulisan, maka didalam proses penelitian ini mengerahkan seluruh daya pikirnya dengan cara menggunakan analisis dan pemikiran kritis untuk menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian atau penemuan kedalam suatu penulisan yang utuh supaya hasil yang diperoleh dalam penelitian metode penulisan ini supaya sistematis dan logis.

Sistematika dalam penulisan ini mulai dari BAB I merupakan bagian pendahuluan berisi dalam penulisan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II merupakan kajian pustaka yang berisi dalam penulisan tentang kajian prostitusi atau pelacuran, model – model prostitusi, bentuk – bentuk prostitusi, konsep anak yang menjadi pelacur, faktor pendorong timbulnya prostitusi, dampak prostitusi terhadap remaja, penyalahgunaan alcohol dan obat – obatan terlarang, kerangka berfikir.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi

BAB IV merupakan hasil perolehan yang dibahas dengan tema sejarah komplek prostitusi di lokalisasi Semampir Kota Kediri tahun 1960 yang berisi perkembangan prostitusi di kota Kediri mulai sejak tahun 1960, perkembangan komplek lokalisasi Semampir.

BAB V merupakan hasil perolehan yang dibahas dengan tema pembahasan dampak penutupan komplek prostitusi di lokalisasi Semampir kota Kediri tahun 1998 hingga proses pengurusan tahun 2016.

BAB VI merupakan akhiran dari pembahasan yang berisi kesimpulan dan penutup.

PEMBAHASAN

Perkembangan Prostitusi Di Kota Kediri Mulai Sejak Tahun 1960

Kota Kediri merupakan kota yang terkenal dengan adanya industri rokok kretek dari PT. Gudang Garam, Tbk.⁵ Pada awal berdirinya industri tersebut hingga sampai sekarang pabrik tersebut mengalami kemajuan yang begitu sangat pesat, baik dari karyawannya yang terhitung ribuan serta teknologi mesin pencetak rokok yang sudah memadai. Dari perkembangan industri rokok tersebut yang berpusat di kota Kediri juga terdapat industri rumah bordil yang berada di Semampir Kota Kediri. Dikarenakan perekonomian di kota Kediri begitu mudah untuk didapatkan dengan adanya pabrik rokok, maka timbul suatu praktik pelacuran yang berada di kota Kediri.

Perkembangan industrialisasi rokok PT Gudang Garam yang berada di kota Kediri sebagai alas ekonomi untuk menopang pendapatan masyarakat Kota Kediri sebagai mata pencaharian di pabrik sebagai pekerja buruh pembuat rokok. Keberadaan industri rokok tersebut yang semakin berkembang menjadikan kota Kediri semakin berubah dan menjadi kota yang maju dalam taraf perekonomiannya, serta diikuti perekonomian lain seperti oleh-oleh khas Kediri yang terkenal yaitu tahu kuning dan gethuk pisang, serta masih banyak lagi kegiatan perekonomian di Kediri.

Munculnya praktik prostitusi atau wanita tuna susila sudah begitu cukup lama tahun 60-an yang berada di kota Kediri. Banyak dari mereka yang berasal dari luar kota Kediri, bahkan dalam kota tentunya pelacuran tersebut mulai beredar dan liar di pusat keramaian kota yang berpusat di alun – alun Kota Kediri yang juga berdekatan dengan area Masjid Jamek atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Agung Kota Kediri. Adanya praktik prostitusi tersebut dilatarbelakangi tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat pengangguran yang cukup banyak, sehingga mereka para PSK mencari pendapatan yaitu membuka jasa layanan prostitusi yang berada di Kota Kediri. Merujuk perolehan data dari lapangan berupa hasil wawancara yang didapat dari Bapak Agus Karwiyanto, hasil data wawancaranya sebagai berikut:

Mulai dari cerita sejarahnya, dulu ceritanya para PSK bermula atau berawal dari alun-alun yang berhadapan dengan Masjid Jamek (yang sekarang menjadi Masjid Agung) yang dulu berpusat di perkotaan Kota Kediri pada tahun 1960 - an.⁶

Dari perolehan data pertama tersebut menyatakan bahwa perkembangan para PSK bermula dan bertempat di alun – alun yang berhadapan dengan Masjid Jamek yang sekarang menjadi Masjid Agung yang berpusat di perkotaan Kota Kediri. Namun dari sisi pembahasan lain terdapat data yang kedua berupa hasil wawancara dari mbah Sapto Darmo, data berupa hasil wawancara tersebut menyatakan:

Dulu awalnya pada tahun 1968 Walikotanya dijabat oleh H. Anwar Jainuddin, tiap malam keliling

seluruh Kota Kediri dia tahu bahwa ada pelacur keleleran yo sewan – sewan, akhire pak Walikota yo sedih to, terus akhire pak Walikota mengumpulkan kepala desa seluruh kota Kediri yang berjumlah 46 desa, ki piye pelacur-pelacur kok keleleran turut ndalan ki piye?, terus sopo sing gelem kanggonan, kanggonan deso? Sama sekali gak enek sing njawab, namun dari rembukan Walikota karo Kepala Desa gak enek sing jawab. Terus akhire Walikota Kediri ingat, wah kota praja, kotamadya kan nduwe tanah Gendom atau tanah Negara yang terletak di Semampir, terus akhire Pak Lurah Semampir namanya pak Kalir Darmo Sumarto ditanya sama Pak Walikota, Lir ki piye WTS – WTS ki kok keleleran, ki carane lak WTS dideleh ndek Semampir noh piye, terserah Pak Wali yang punya hak kan Pak Walikota tutur Kalir Kepala Lurah Semampir. Begitupun akhirnya Walikota Kediri memutuskan bahwa WTS tersebut yang keleleran dipindahkan dan ditempatkan di Semampir di tanah Gendom milik Pemerintah Daerah. Jadi Semampir tempatnya.⁷

Dari kedua data berupa hasil wawancara tersebut, perolehan data pertama dari Bapak Agus Karwiyanto dan data yang kedua diperoleh dari Mbah Sapto Darmo terdapat perbedaan tahun. Perbedaan tahun dari data yang pertama menyatakan tahun 1960 sedangkan data yang kedua menyatakan tahun 1968. Dari pengumpulan data tersebut menyatakan bahwa perkembangan prostitusi di Kota Kediri bermula pada dekade tahun 1960-an yang bertempat di Kota Kediri.

Pada waktu tahun 1960-an perkembangan prostitusi atau wanita tuna susila masih berkeliaran dan melakukan transaksi yang berpusat pada keramaian Kota atau alun – alun yang berdekatan dengan Masjid Jamek atau yang sekarang dikenal dengan Masjid Agung Kota Kediri.

Pada awalnya praktik liar prostitusi belum ada penanganan dari pemerintah Kota Kediri. Penanganan terhadap prostitusi tersebut baru terjadi tahun 1968 oleh pemerintah Kota Kediri yang dijabat oleh Bapak Anwar Jainuddin. Penanganan ini masih berupa musyawarah perencanaan penempatan para PSK. yang dihadiri 46 lurah Kota Kediri yang bertujuan untuk menempatkan para wanita tuna susila disalah satu tempat yang berada di Kota Kediri. Hasil musyawarah antar lurah menyatakan diantaranya para Lurah belum ada yang sanggup untuk menerima keberadaan para PSK yang mana lahan desanya akan di tempati dan dijadikan tempat lokalisasi. Akhirnya Walikota Kediri dengan pertimbangan memutuskan bahwa Kota Kediri memiliki tanah gendom atau tanah kota Kota Praja yang berada di kelurahan Semampir Kota Kediri. Maka tempat tersebut akan dijadikan sebagai lahan penampungan para PSK yang masih berkeliaran di Kota Kediri.

Perkembangan Komplek Lokalisasi Semampir

⁷ Wawancara dengan Mbah Sapto Darmo, Selaku mantan perangkat desa Kelurahan Semampir. Wawancara dilakukan di rumah Mbah Sapto Darmo yang bertempat di Jl, Mayor Bismo Kelurahan Semampir Kota Kediri.

⁵<http://seputargudanggaram.blogspot.com/2016/04/sejarah-gudang-garam-sejarah-singkat.html>

⁶ Wawancara dengan Bapak Agus Karwiyanto, selaku ketua RW 05, wawancara dilakukan di rumah Bapak Agus Karwiyanto yang bertempat di area lokalisasi Semampir

Perkembangan kompleks lokalisasi Semampir mengalami peristiwa sejarah yang panjang. Perkembangan kompleks lokalisasi Semampir berawal dari tanah gendom atau tanah kota Praja. Pada tahun 1960-an tanah gendom ini merupakan tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman orang cina. Akhirnya setelah sekian lamanya, tanah yang digunakan sebagai tempat pemakaman cina tersebut beralih fungsi sebagai tempat penampungan para WTS.

Luas tanah tersebut yang diperoleh dari sumber arsip menunjukkan SHP milik pemerintah Kota Kediri seluas 13.925 M² yang dijadikan sebagai tempat penampungan untuk WTS. Luas lahan tersebut oleh pegawai Pemda dikelola dengan di bagi dan di petakkan untuk di sewakan kepada para WTS yang nantinya menempati petak – petak lahan tersebut.⁸ Namun sebelumnya pemerintah membuat kesepakatan berupa perjanjian. Perjanjian tersebut berupa tanah yang ditempati para wanita tuna susila akan di ambil alih oleh Pemerintah Kota Kediri ketika suatu saat akan dibutuhkan. Maka yang menempati lahan tersebut harus merelakan lahan tempat tinggalnya yang disewa tersebut untuk diambil lagi oleh Pemerintah Kota Kediri.

Merujuk perolehan data pertama dari lapangan berupa wawancara dari mbah Sapto Darmo, hasil datanya sebagai berikut:

*Begitupun dulu akhirnya walikota Kediri memutuskan bahwa wts tersebut yang keleleran di pindahkan dan ditempatkan di Semampir di tanah Gendom milik pemerintah daerah. Jadi Semampir tempatnya. Terus pada tahun 1969 perintah pegawainya pemkot namanya Porwoko dan Sunarto, berkunjung ke Desa Semampir, waktu itu Mbah Sapto masih jadi komandan hansip yang mengantarkan saya dengan Pak Bayan untuk ngukur lokasinya pada jam 3 sore pada saat itu tanahnya masih ditempati makam Cina atau Bong Cino, terus akhirnya saya ukur sama Pak Bayan sama pihak pegawai kota menjadi 90 petak. Dan itupun siapa yang menempati siapa gak tau, tapi akhirnya juga banyak yang nempati dan banyak yang datang nyileh panggon. Pada akhirnya dari situ berdiri WTS dulu rumahnya masih gedek-gedek payone yo welit, dadi yo nggempuri tanah kuburan bong kuwi. Akhire 90 petak itu penuh. Terus dijadikan tempat lokalisasinya para WTS.*⁹

Menurut sumber data yang kedua berupa wawancara dari Bu Dewi Sartika menyatakan bahwa:

nah itu dulu itu lahan memang disewakan untuk didirikan rumah “di sewa masyarakat untuk didirikan rumah”. Dulu itu hanya sewa saja. Jadi itu sewa, akadnya itu sewa kalau gak salah tahun 80-an berapa, nanti bisa ke Dinas Sosial menemui pak Zilus, data itu ada disana mas. Jadi itu masyarakat pada tahun 80-an itu sewa tanah, setiap orang yang sewa ada sertifikat sewanya. Nah di situ ada syarat syarat bahwa di sertifikat sewa tidak boleh mendirikan bangunan permanen, dan tidak boleh dipindah tangankan, dan tidak boleh untuk usaha, didalam usul perjanjian itu ada. Tetapi pada berjalannya waktu dan

pada itu kan namanya peraturan itu masih belum mematuhi peraturan, dan sehingga dari Pemda nya sendiri kurang pengawasan, nah masyarakatnya sak enak’e dewe. Jadi yang ada di Kota Kediri itu ada pengurusan di lokalisasi Semampir itu tujuannya adalah meminta kembali lahan Pemkot yang dimanfaatkan tidak sebenarnya untuk lahan prostitusi.

Merujuk dari kedua perolehan data tersebut, data pertama dari Mbah H. Sapto Darmo menjelaskan bahwa lahan yang dijadikan tempat prostitusi sebelumnya merupakan tempat pemakaman orang China atau Bong Cino. Akhirnya tempat pemakaman China tersebut dipindahkan dan bekas lahan tempat pemakaman tersebut akhirnya di ratakan dan di bagi sesuai petak – petak yang akan disewakan kepada para PSK tersebut. Selanjutnya tempat tersebut dipenuhi oleh para PSK dan didirikan bangunan - bangunan sederhana dengan bahan baku berupa anyaman dari bambu untuk dijadikan rumah. Namun sebelumnya, dari pihak pemerintah kota Kediri sendiri memberikan beberapa perjanjian terhadap penyewa lahan milik pemerintah.

Perjanjian tersebut dapat ditinjau dari perolehan data yang kedua dari Bu Dewi Sartika yang menjelaskan bahwa setiap warga yang menyewa lahan di lokasi Semampir tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan secara permanen, dan tidak diperbolehkan status sewanya yang pertama dipindah tangankan ke pemilik kedua atau orang lain, dan tidak diperbolehkan untuk usaha. Perjanjian tersebut sudah masuk peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah kota Kediri sebelumnya. Namun pada kenyataannya justru menyalahi aturan yang telah ditetapkan pemerintah kota Kediri hingga mereka sampai mendirikan bangunan secara permanen. Dari kasus tersebut sudah sangat jelas bahwa pemerintah kota Kediri sebagai pemilik tanah kurang adanya pengawasan dan kurang adanya ketegasan terhadap penyewa lahan untuk meninjau ulang terkait peraturan – peraturan sewa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada akhirnya seiring berjalannya waktu dari mulainya mereka menduduki lahan lokasi Semampir hingga sampai akhirnya mereka membuka tempat prostitusi di Desa Semampir. Penempatan mereka inilah sebelumnya sudah disediakan oleh pemerintah kota Kediri untuk menampung para PSK yang dulunya liar yang berpusat di taman kota yang kini sudah menempati lokasi yang berada di Desa Semampir sebagai tempat lokalisasi resmi mereka melakukan jasa pelayanan prostitusi.

Lokasi prostitusi ini berada di Desa Semampir yang berhadapan langsung dengan Industrialisasi pabrik rokok PT. Gudang Garam Tbk, dan letak lokalisasi ini berada di Timur sungai Brantas, dan letak dari lokalisasi Semampir ini sangat mudah diakses oleh transportasi umum seperti bus yang menghubungkan antar kota dalam provinsi karena letak lokalisasi ini juga berada di pinggir jalan raya yang lebih tepatnya terdapat di selatan jalan raya.

Berdirinya lokalisasi ini mengalami perkembangan dari tahun ketahun. Hingga dari mereka memberikan

⁸Sumber arsip Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Sertifikat Pemerintah Kota Kediri.

⁹ Wawancara dengan Mbah Sapto Darmo.....

beberapa julukan tempat usahanya sebagai tempat pelayanan prostitusi seperti:

*Maskot, pokok sing gelem ngresiki yo dipanggoni sampek sak matine.*¹⁰

1. Perkembangan Komplek Kasur Ijo

Berdirinya Komplek Kasur Ijo mengawali keberadaan para wanita tuna susila yang pertama kalinya menempati lahan dari pemerintah Kota Kediri. Peralihan para WTS dari pusat keramaian Kota Kediri atau alun – alun menuju lahan baru, lahan yang berada di lokasi Semampir yang telah di sediakan pemerintah tersebut dari tahun ketahun mengalami perkembangan dan masa - kemasa. Rumah bordil tersebut diberi nama Kasur Ijo ini mulai di usung sejak tahun 1969 atau setelah beberapa para WTS menempati lahan yang disediakan pemerintah tersebut.

Peralihan para WTS dari pusat taman kota menuju lahan baru ini dikarenakan merusak keindahan dan ketentraman warga, sehingga pemerintah kota Kediri pada kala itu menindak lanjuti kasus WTS yang masih liar yang berceceran di Kota Kediri. Kebijakan pemerintah kota Kediri menempatkan para WTS tersebut menjadi satu di lahan desa Semampir dikarenakan pemerintah kota Kediri mempunyai aset tanah berupa tanah gendom atau tanah kota Praja yang berlokasi di desa Semampir tersebut. Begitu ketika para WTS sudah mendapatkan dan menempati lahan di Semampir dengan status sewa, dari kurun waktu kewaktu aktivitas keberadaan para wanita tuna susila mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan membentuk warga lokalisasi Semampir yang berada di Kelurahan Semampir tersebut.

Para wanita tuna susila ini, setelah mereka disediakan dan menempati lahan baru milik pemerintah tersebut masih tetap melakukan prostitusi dengan para tamunya untuk menyambung hidup mereka sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Dari kampung lokalisasi tersebut mereka memulai membentuk komplek tempat rumah bordil dengan nama julukan kampung *kasur ijo* pada tahun 1969. Merujuk perolehan data dari lapangan hasil datanya berupa wawancara dari salah satu warga yang bernama Bu Endang Sri Utami, hasil datanya sebagai berikut:

kula sampun mulai alit mas, manggen dateng mriki, di Desa Semampir, mulai tahun 1969 kula kalian tiang sepah kula pun manggen dateng mriki. Enek'e lokalisasi Semampir niku mulai ketinggal tahun 1958 – an tasik mulai untup – untup niku masTempat ini dulu ceritanya makam bong cino, ceritane jaman semanten sanjange tiang sepah kula ingkang meniko sampun sedo. Nggeh panggon niki riyen enten lare setri niku sing apik enten nggeh enten ingkang mboten sae, nggeh damel praktek jaman semanten mulai tahun 1960 mulai didamel panggonan praktik PSK saking mbak-mbak'e niku riyen, jamane riyen tasek ndamel sak enek'e mas, jik ndamel kloso digawe pijat – pijetan ngoten niku. jaman semanten mas tasih di jenengne kasur Ijo, lha terus niku didadosaken setunggal poro PSK wonten dateng mriki jamane Walikotane Pak

Dari sumber perolehan data berupa wawancara dilapangan dari warga yang bernama Bu Endang Sri Utami, hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa keberadaan mereka atau para WTS setelah mengalami peralihan tempat, dari pusat hiburan kota menuju lahan baru di Desa Semampir, perkembangan atau aktivitas pelayanan dari para WTS itu cenderung lebih cepat dan meningkat. Hal ini dikarenakan mereka lebih terpusat dan lebih memudahkan para pengunjung pria hidung belang untuk menjajaki di komplek Semampir ini. Dari lahan baru ini para WTS mulai bekerja di masing – masing lahan sewanya yang mereka tempati tersebut. Bangunan yang mereka tempati ini masih cenderung berupa bangunan gedek – gedek yang berasal dari anyaman bambu dan beratapkan seng atau jerami. Komplek bordil tersebut, dulunya masih terkenal dan dijuluki dengan julukan Kasur Ijo.

Seiring berjalannya tahun, kehidupan para WTS di lokalisasi Semampir ini mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Peningkatan perekonomian mereka dari jasa layanan prostitusi mengalami perkembangan dari komplek atau kios tempat bangunan mereka dipercantik dan diperindah, yang dulunya masih berupa bangunan gedek - gedek atau bangunan sederhana pada jamannya yang sekarang mereka tempati kian tahun mengalami perubahan hingga bangunan tersebut dijadikan bangunan semi permanen bahkan hingga sampai yang permanen.

Perkembangan Komplek Loh Jembot

Perkembangan para WTS dari peralihan Kasur Ijo menuju Loh Jembot ini masih terlihat sama seperti sebelumnya. Perkembangan ini dapat dilihat mulai dari aktivitas para WTSnya yang masih menjual jasa pelayanan prostitusi hingga bangunan yang mereka tempati masih berbentuk gedek atau berbahan dasar dari anyaman bambu. Namun diantaranya sudah ada dari beberapa rumah yang merenovasi rumahnya menjadi bangunan semi permanen yaitu kombinasi antara tembok dan gedek atau triplek.

Perkembangan pada komplek ini terlihat dari banyaknya jumlah WTS pendatang dari penjurur kota yang kian padat menempati komplek rumah bordil di Semampir. Dari peralihan julukan Kasur Ijo menuju Loh Jembot ini kurang lebihnya sekitar tahun 1980 an. Kemajuan lokasi rumah bordil ini terlihat dari adanya tim pihak kesehatan yang memeriksa hingga memberikan suntik anti virus secara rutin kepada para pelaku pekerja komersial atau WTS. Selain itu terdapat juga kegiatan olahraga kebugaran jasmani dan kegiatan mereka pada periode sekitar tahun 80-an ini, mereka juga membuka usaha jasa kecantikan seperti salon dan juga membuka usaha tempat rumah makan. Dari data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari warga yang bernama Bu Endang Sri Utami, data tersebut menyatakan bahwa:

¹⁰ Wawancara dengan Bu Endang Sri Utami, Selaku Warga yang tinggal di sebelah komplek lokalisasi Semampir Kota Kediri, wawancara dilakukan di rumah Bu Endang Sri Utami.

sak meniko namine enten telu mas, nggeh awale niku wau Kasur Ijo, terus bibar niku kinten-kintene tahun 72-an gantos namine dados Loh Jembot. Terus ganti maleh mas, bibar loh jembot gantos Moro Seneng meniko tahun 80 sampek 90-an. Saking Loh Jembot niku mas mulai dianggeni mulai ketinggal bangunan bangunan nggeh tasik gedek-gedek tasih ndamel triplek ngoten riyen. beranjak pada tahun 80-an para PSK sampun dugi pundi-pundi teng mriki sedanten, bangunan wis hampir sempurna wis koyok Dolly pada tahun 80-an, dan itupun sampun enten pihak kesehatan juga terus suntik rutin supoyo ben gak keserang penyakit, terus senam sak ben isuk, masak-memasak terus nyalon (belajar nyalon) pokoke yo dibina mas tambah suwi tambah maju.¹¹

Dari data yang diperoleh terdapat nama julukan kompleks Loh Jembot. Komplek Loh Jembot ini berada setelah kompleks kasur ijo, kebijakan pemerintah kota Kediri masih memberlakukan pajak sewa lahan terhadap mereka yang sudah menempati. Namun dari sini peneliti mendapati keraguan. Keraguan yang peneliti dapatkan dari aturan yang dikeluarkan pemerintah yang berisi aturan berbentuk larangan sewa mendirikan bangunan secara permanen. Merujuk dari data tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 1980-an para WTS atau yang menyewa bangunan tersebut terlihat mulai muncul mendirikan bangunan – bangunan yang hampir sempurna yang artinya bangunannya mulai semi permanen. Pada periode ini, memang diketahui bahwa aturan – aturan hukum yang diberlakukan belum ditegaskan dan belum adanya kesadaran dari pihak Pemerintah Kota Kediri nya sendiri.

Ada sumber data lain yang menyatakan sama dari perolehan data pertama oleh Bu Endang Sri Utami terkait keberadaan PSK yang berasal dari luar kota yang berada di Kota Kediri. Adapun data yang diperoleh ini berupa hasil wawancara dari Bu Dewi Sartika yang mengungkapkan³ bahwa:

Iya, itu istilahnya warga yang terdampak yang melakukan kegiatan. Jadi kegiatan yang di lakukannya itu yang terselubungnya dari karaoke, tapi di karaoke itu tersedia kamar – kamar yang di sewakan, jadi kegiatan itu yang terselubung. Karaoke di situ kan banyak yang berada di situ ya itu tadi orang – orang yang buka kos – kosan, yang jualan makanan, orang cuci, mereka semua mendapatkan keuntungan dari aktivitas itu. Itulah mereka yang saya data yang harus saya entas, yang harus saya alihkan profesinya. Nek dek'e pomone gak jualan di situ terus kemana? Lha bersamaan itu memang kita mendata, bahwa pemilik atau yang tinggal di situ itu maksimal 6 bulan itu sudah di ganti orang. Jadi ngene iki mau kan lahan iki mau kan di sewa, di sewa untuk rumah itu lah ada yang 3 bulan pindah, ada yang 6 bulan. Jadi di situ kontrak jadi wes ya sampai ganti orang sampai ke delapan kali atau apa gitu jadi sampai ke generasi berikutnya di oper – oper gitu. Nah permasalahannya dulunya itu orang luar, bukan warga Kota Kediri. Permasalahannya dulu itu kan pada tahun 2009 kalau gak salah pemilu tahun 2009, ya namanya politik itu mereka semua di naturalisasi jadi mereka semua di beri KTP Kota Kediri, nah yang jadi

masalah biasanya kalau mereka bukan orang Kota Kediri ya karek di usir aja, nah tapi mereka sudah orang Kota Kediri karena punya KTP Kota Kediri, dan mereka ada yang dari Aceh, ada yang dari Jawa Barat tapi kasus politik itu tidak memikirkan dampak lanjutannya kalau ini di kasih KTP orang Kota Kediri supaya dia nyoblos Si A, Si B, Si C, atau nyoblos apapun itu kan pada dampaknya ini berarti kan mereka sudah warga Kota Kediri sudah mempunyai hak dia ini tek'ku berarti ini kan hak dia, nah itu lah bahwa politisi tidak berfikiran sepanjang itu yang ada dampak lanjutannya.

Dari perolehan data yang kedua ini berupa wawancara dari Bu Dewi Sartika. Perolehan data yang kedua ini terletak kesamaannya pada data yang pertama dari Bu Endang Sri Utami yang mengungkapkan bahwa mereka sudah datang dari mana – mana yang menempati di Semampir, maksudnya para PSK tersebut sudah datang dari beberapa kota yang mendiami di Semampir ini. Sedangkan dari data yang kedua dari Bu Dewi Sartika mengungkapkan bahwa mereka ada yang berasal dari Aceh, ada yang dari Jawa Barat. Dari perolehan data ini memang jelas menyatakan bahwa keberadaan para PSK yang mendiami di lokasi Semampir ini berasal dari luar kota bukan asli warga Kota Kediri.

Dari riset hasil penelitian yang telah didapatkan, pembahasan yang diungkapkan oleh Bu Dewi Sartika cenderung kepada dampak yang diakibatkan dalam pemberlakuan penutupan tahun 1998. Pembahasan yang diungkapkan oleh Bu Dewi Sartika ini belum kepada perkembangan dan justru cenderung terhadap dampak – dampak yang diungkapkannya. Namun dalam riset yang didapatkan ini lebih fokus terhadap asal usul para PSK yang bertempat di lokasi Semampir.

Perkembangan Komplek Moro Seneng

Perkembangan kompleks moro seneng ini terbentuk dari peralihan antara kompleks kasur ijo dan kompleks loh jembot. Perkembangan kompleks moro seneng ini sudah lebih meningkat dari kompleks yang sebelumnya. Peralihan dari kompleks Kasur Ijo, Loh Jembot menuju kompleks Moro Seneng ini mulai sekitar sejak tahun 1990-an.

Perkembangan dan aktivitas warga WTS di lokasi rumah bordil ini sudah begitu sangat maju, kemajuan ini terlihat dari adanya kehidupan mereka sudah seperti penduduk tetap dan membentuk RT lokasi, serta kemajuan dari mereka terlihat dari bangunan tempat tinggal mereka yang sudah bagus berdiri secara permanen.

Para warga lokasi ini mayoritas dari mereka mengandalkan jasa pelayanan prostitusi sebagai tempat mereka bekerja dengan mengandalkan profesinya sebagai WTS tersebut. Dari data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari Ketua RW 05 yaitu bernama Bapak Agus Karwiyanto, data tersebut menyatakan bahwa:

Mulai menginjak pada tahun 1980-1990 an mereka sudah menetap disana dan banyak melakukan aktivitas, serta menjadi warga tetap dan mulailah membentuk RT lokasi Semampir yang terdapat RT 01 dan RT 02. Mengingat dari pembuatan KTP itu, secara resmi warga

¹¹ Wawancara dengan Bu Endang Sri Utami.....

lokalisasi yang aslinya dari PSK sendiri itu adalah pendatang dari penjurukota, bahkan dari Aceh, Banten, Bandung, Jakarta, dari Sumatera, dan bahkan dari Sulawesi yang melacur, akhirnya secara resmi mereka diakui menjadi warga kota Kediri, meskipun yang dulunya menjadi orang perantauan yang datang ke Kediri hingga menduduki lahan yang begitu cukup lama di desa Semampir. Aktivitas warga lokalisasi juga mereka yang berprofesi sebagai pelacur atau PSK pada tahun 1980-an hingga pada tahun 1990 tersebut mengalami suatu transisi dimana yang awalnya masih sederhana dari bangunan tempat tinggal mereka yang berupa gedek-gedek atau gubuk-gubuk mengalami begitu banyak kemajuan dikarenakan pendapatan atau perolehan mereka (warga lokalisasi semampir) dari segi ekonominya mereka yang berprofesi sebagai pelacur bisa merenovasi bangunan tempat tinggal mereka yang mereka tempati mulai dari pembangunan untuk tempat karaoke hingga membuka salon kecantikan bahkan sampai menambah bangunan mereka untuk kios-kios penginapan yang di khususkan untuk para pengunjung yang hendak mampir dan bermalam bersama para wanita-wanita tuna susila tersebut.¹²

Merujuk dari perolehan hasil berupa wawancara tersebut diatas menggambarkan aktivitas dari para WTS atau pekerja prostitusi di Semampir ini sekitar pada tahun 1990-an, mereka menempati letak yang strategis.

Keberadaan kompleks lokalisasi Semampir tersebut berada di samping jembatan baru Kota Kediri, dan berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan wilayah dari Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kabupaten Kediri, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, hingga Surabaya dan seterusnya yang bisa melewati akses jalan raya ini dan sangat mudah dijangkau oleh transportasi, transportasi tersebut seperti bis antar kota dalam provinsi yang berjarak begitu dekat dengan lokasinya sekitar ± 10 Meter sudah tiba di lokasi rumah bordil atau kompleks Semampir. Selain itu adanya industrialisasi PT Gudang Garam yang menunjang tempat mereka, karena dari adanya pabrik tersebut memang mayoritas buruh pekerjanya perempuan dari pagi hingga sore, namun dari hal tersebut juga ada beberapa buruh Gudang Garam yang juga menjadi pelaku berupa jasa pelayanan prostitusi.

Keberadaan lokalisasi ini cukup strategis untuk dijangkau oleh para konsumen hidung belang seperti, sopir truck yang melewati jalan tersebut hendak mampir untuk melepaskan lelah serta juga ingin menikmati para WTS yang sudah berjejer – jejer. Selain para sopir truck, juga ada dari mereka yang berasal dari luar kota yang datang ke lokalisasi menggunakan alat transportasi bis antar kota yang ingin dilayani oleh para WTS.

Tingkat pendapatan mereka pada tahun 1990 ini, mereka meraup keuntungan sangat besar dari kegiatan prostitusi yang mereka lakukan di rumah bordil Semampir. Banyak dari mereka yang sudah sukses melakukan bisnis prostitusi ini. Di tempat tinggal mereka yang merantau di Semampir Kota Kediri ini, mereka sudah mempunyai

rumah bahkan mereka bisa membeli pekarangan di desa asal mereka dari hasil kegiatan prostitusi ini di Semampir.

Pada awal mulanya para WTS tersebut yang berasal dari luar kota atau luar provinsi dengan niatan kerja keluar Negeri menjadi TKW, justru sebaliknya, mereka berbalik arah dan tujuan terhadap tindakan yang menyalahi aturan atau penyimpangan sosial. Dari data yang diperoleh berupa hasil wawancara dengan mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri yang bernama Bu Dewi Sartika, data tersebut menyatakan bahwa:

Mereka lho mas sudah kaya sebenarnya dari hasil pelacuran ini, mereka yang berdatangan ke sini itu, mereka pamit kepada keluarganya dan alasan mereka tersebut kepada keluarganya kalau kerja jadi TKW ke luar Negeri, padahal sebenarnya mereka pergi dan datang kesini itu hanya bekerja gitu – gitu tujuannya merantau disini hanya melacur dan menjual jasanya sebagai WTS.¹³

Dari perolehan hasil berupa wawancara tersebut menjelaskan bahwa fenomena prostitusi di Kota Kediri tersebut begitu sangat berkembang, perkembangan tersebut bisa dilihat mulai dari pendapatan mereka di kompleks lokalisasi pada tahun 1990 ini masih dijuluki dengan kompleks moro seneng, mereka para pekerja prostitusi pada tahun 90-an ini sudah membludak dan padat penduduk yang berasal dari penjurukota yang mendatangi kompleks Moro Seneng ini. Perkembangan kompleks Moro Seneng ini mulai terlihat sejak tahun 1990-an. Bangunan yang mereka sewa dan yang mereka tempati di atas lahannya milik pemerintah tersebut sudah menyalahi aturan sebelumnya, aturan yang pemerintah berikan sebelumnya terdapat beberapa larangan untuk tidak mendirikan bangunan permanen, namun pada periode tahun 90-an ini mereka sudah melanggar peraturan dengan mendirikan bangunan dan menyewa lahan lagi untuk memperluas dan mengembangkan jasa prostitusinya dan tempat hiburan dengan membangun bangunan permanen.

Pada periode tahun 1990-an ini, keberadaan aktivitas mereka yang legal berakhir di tahun 1998. Perkembangan para pekerja prostitusi di lokalisasi Semampir ini disebabkan berhenti karena Pemerintah Kota Kediri telah mengeluarkan PERDA yang berisi pemberantasan pelacuran di Kota Kediri. Pengeluaran surat PERDA dari pemerintah Kota Kediri ini terdapat alasan yang berupa himbauan dari ketua umum partai PKB Abdurrahman Wahid yang menghimbau adanya lokalisasi di Kediri ini supaya ditutup, karena di Kota Kediri ini terdapat Pondok Pesantren Lirboyo. Dari sinilah kompleks atau tempat prostitusi di Kota Kediri ini terjadi peristiwa penutupan dengan dikeluarkannya surat PERDA tahun 1998 oleh Pemerintah Kota Kediri.

A. Pemerintah Kota Kediri Mengeluarkan Perda tahun 1998.

¹² Wawancara dengan Bapak Agus Karwiyanto

¹³ Wawancara dengan Bu Dewi Sartika

Prostitusi di Kota Kediri memang terlihat berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tahun ketahun atau periodisasi waktu mulai dari keberadaannya sejak tahun 1960 sampai pada tahun 1998. Dengan Pemerintah memberikan suatu kebijakan kepada mereka yang awalnya, yaitu berupa penyediaan lahan di desa Semampir yang nantinya mereka sewa.

Keberadaan para PSK atau para pekerja sebagai prostitusi sebenarnya dari kajian sosiologis, prostitusi merupakan penyimpangan sosial yang merusak norma, moral, agama, serta hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Namun keberadaan prostitusi di Kota Kediri, pada tahun 1998 ini masih belum adanya kesadaran dari Pemerintah Daerah Kota Kediri untuk menanggulangi adanya kasus prostitusi di Semampir yang masih berkelanjutan. Baru ketika adanya acara haul Muktamar NU se – Indonesia yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo yang dihadiri oleh ketua umum partai PKB Abdurrahman Wahid atau Gus'Dur terdapat himbauan untuk menutup lokalisasi Semampir. Penutupan lokalisasi Semampir tersebut terdapat suatu alasan dari ketua umum partai PKB Abdurrahman Wahid untuk segera menutup, menurutnya "*Di Kota Kediri ada Muktamar Nu, ada Pondok Pesantren lirboyo, kok ada tempat lokalisasinya?*", tutur Gus'Dur ketika selesai menghadiri acara Haul Muktamar NU tersebut. Pada waktu ketika itu tahun 1998 beberapa minggu kemudian setelah acara haul Muktamar NU yang bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo turunlah PERDA atau Peraturan Daerah dari Pemerintah Kota Kediri yang isinya menutup kawasan komplek lokalisasi Semampir Kota Kediri.

Adapun tujuan PERDA atau Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, Nomor 26 Tahun 1998 secara tertulis berisi tentang *Pemberantasan Pelacuran Dalam Kotamadya Daerah Kotamadya Kediri*.¹⁴ Tujuan dikeluarkannya peraturan daerah tersebut supaya tidak adanya aktivitas pelacuran atau aktivitas prostitusi dan menutup kawasan komplek lokalisasi Semampir Kota Kediri. Dari himbauan tersebut secara resmi lokalisasi Semampir kota Kediri telah ditutup dan tidak ada aktivitas kegiatan prostitusi lagi.

B. Larangan Mengoperasikan Tempat Prostitusi.

Secara umum prostitusi di lokalisasi Semampir menurut aturan yang dikeluarkan pemerintah kota Kediri melalui surat PERDA telah dinyatakan di tutup. Namun dari penutupan tersebut tidak adanya rasa jera kepada para pelaku prostitusi yang berada di lokalisasi Semampir Kota Kediri. Mereka, para pelaku prostitusi atau PSK membuka secara illegal tempatnya dengan menggunakan kedok tempat hiburan karaoke. Aktivitas prostitusi illegal tersebut yang berada di lokalisasi Semampir mulai kelihatan dan mulai beroperasi kembali seperti sebelumnya pada tahun 2000-an.

Dari data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari Ketua RW 05 yang bernama Bapak Agus Karwiyanto, data tersebut menyatakan bahwa:

"Aktivitas prostitusi di Semampir ini sejak diberlakukannya penutupan oleh Pemda Kediri mulai kelihatan pada tahun 2000-an, dimana aktivitas tersebut berkedok tempat hiburan karaoke, mereka mensiasati dengan tempat hiburan karaoke supaya lebih aman kan, karena mereka disini sudah illegal statusnya. Pada dasarnya aktivitas mereka disini juga sama seperti sebelumnya yaitu tempat prostitusi".

Dari hasil data perolehan dilapangan tersebut diatas, data berupa wawancara tersebut dapat ditinjau lagi bahwa, mulai sejak tahun 2000-an setelah pemerintah Daerah mengeluarkan PERDA yang menghimbau terkait penutupan dan pemberantasan pelacuran di Kota Kediri tersebut, Pemerintah Daerah dulunya masih belum sepenuhnya mengatasi terkait kasus adanya tempat prostitusi beserta pelakunya. Hal ini bisa dikarenakan pemerintah daerah kota Kediri masih belum bisa melepas retribusi pajak sewa tempat pada waktu itu, dan ada pendapat lain yang menyebabkan pemerintah daerah belum adanya kesadaran hukum, karena pengeluaran PERDA tersebut hanya disampaikan saja namun tidak adanya tindakan yang tegas pada intinya mengentas mereka dari tindakan prostitusi.

C. Dampak Sosial dan Politik Adanya Prostitusi Pembuatan KTP Sebagai Status Warga Kediri Untuk Ajang Politik Pemilu Walikota Kediri Tahun 2009

Keberadaan warga baru yang tinggal di Kota Kediri yang terhitung begitu cukup lama telah diberlakukan pembuatan KTP oleh pihak Kelurahan Semampir kepada warga lokalisasi mulai sejak tahun 2009. Pemindehan status sebagai penduduk yang berasal dari luar kota yang telah lama merantau dan mendiami Desa Semampir telah dialihkan statusnya sebagai warga Kota Kediri dengan pendataan dan pembuatan KTP di Kota Kediri. Hal ini menjadikan suatu pengaruh besar dan menjadi dampak buruk karena mereka telah mempunyai hak atas penerimaan berupa fasilitas dari pemerintah Kota Kediri yang disediakan, dari status mereka yang berada di lokalisasi sebelumnya terlihat menyimpang, perilaku menyimpang ini terlihat dari aktifitas mereka yang melakukan tindakan prostitusi, sedangkan asal keberadaan mereka sebelumnya dari penjuror luar kota yang merantau lama tinggal di Kota Kediri yang tepatnya di Lokalisasi Semampir tersebut.

Pemberlakuan pembuatan KTP dari penduduk luar kota ke penduduk Kota Kediri tersebut memang ada yang mempengaruhi dari salah satu pihak tim sukses dari kubu pemenang yang mencalonkan sebagai calon Walikota Kediri yang akan adanya penyelenggaraan pemilu Walikota Kediri pada tahun 2009, periode 2009 – 2014 lalu.

¹⁴ Sumber Arsip Pemerintah Kota Kediri tentang PERDA/ Peraturan Daerah, tentang Pemberantasan Pelacuran Di Kotamadya Kediri

Pembuatan KTP dari penduduk luar Kota ke penduduk Kota Kediri ini sebagai ajang perpolitikan untuk

Tabel 5.2 Jumlah Data Warga Secara Keseluruhan yang berada di Kelurahan Semampir RW 005, Yang Bertempat Di SHP 50 Tahun 2001

Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
RT 29	43 KK	104 Jiwa
RT 30	54 KK	150 Jiwa
RT 31	90 KK	241 Jiwa
RT 32	74 KK	187 Jiwa
Jumlah	261 KK	682 Jiwa

2013	22700	8.20	1.60	0.47	349925
2014	22130	7.95	0.91	0.17	366788
2015	23770	8.51	1.40	0.43	386521
2016	23640	8.40	0.96	0.20	400096

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri

menambah perolehan hak suara dari salah satu kubu koalisi partai dari pencalonan Walikota Kediri. Namun dampak pembuatan KTP tersebut, selanjutnya tidak dipikirkan oleh pihak yang mencalonkan dari akibatnya. Begitu ketika periode 2009 – 2014 ini Walikota yang dimenangkan oleh Bapak dr. Samsul Azhar yang di usung dari partai PDIP, baru terlihat adanya gugatan dari Gubernur Jawa Timur yang di pimpin oleh H. Soekarwo yang menghimbau untuk memberantas pelacuran atau lokalisasi WTS di Jawa Timur. Namun keberadaan lokalisasi di Kota Kediri yang berada di lokalisasi Semampir tersebut masih belum adanya tindakan secara tegas dari Pemerintah Kota Kediri untuk memberantasnya, hanya tindakan – tindakan kecil untuk menangani para WTS di Semampir dengan menyediakan pelatihan - pelatihan kerja untuk para WTS di lokalisasi Semampir.

Dari perolehan sumber data dari Badan Pusat Statistik tersebut dijelaskan bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2016 angka kemiskinan di Kediri masih terlihat cukup besar. Banyaknya kemiskinan di kota Kediri ini juga terlihat di kawasan lokalisasi Semampir yang mayoritas dari aktivitas mereka menggantungkan hidupnya dari hasil jasa prostitusi. Penduduk yang menempati komplek lokalisasi Semampir berada di RW 005 yang diketuai oleh Bapak Agus Karwiyanto yang menaungi empat RT yaitu RT 29, RT 30, RT 31, dan RT 32. Adapun sumber data yang diperoleh berupa tabel sebagai berikut:

2. Tindakan Kriminalitas Dari Perilaku Prostitusi

Perubahan sosial yang terjadi dari adanya tempat prostitusi di Kediri memang dilatarbelakangi kualitas SDM yang begitu cukup rendah. Rendahnya SDM mereka, mengakibatkan banyaknya masyarakat kota Kediri ini yang menggantungkan hidup mereka secara umum sebagai karyawan buruh di pabrik industri rokok gudang garam.

Dari total perolehan sumber data tersebut yang berada di kawasan lokalisasi Semampir di atas tercatat dari keseluruhannya berjumlah 682 jiwa. Para penduduk yang mendiami di kawasan komplek prostitusi ini merupakan penduduk atau warga yang terdampak, warga yang terdampak inilah yang sebelumnya distatuskan kedudukannya menjadi penduduk warga Kota Kediri. Mereka yang bertempat tinggal di kawasan lokalisasi ini berada di atas tanah pemerintah yang statusnya SHP atau sertifikat hak pakai.

Mata pencaharian mereka yang berada di lokalisasi Semampir ini beraneka ragam, ada yang dari mereka membuka toko peracangan, warung makan, laundry, salon kecantikan, tempat karaoke, dan pekerjaan mereka selain itu yang lebih utama diprioritaskan yaitu jasa pelayanan prostitusi, karena adanya jasa prostitusi di lokalisasi Semampir ini perekonomian mereka di komplek ini berjalan dengan lancar. Dari kegiatan prostitusi inilah, prostitusi sebagai jantung dan pundi – pundi mereka mencari penghasilan di komplek Semampir.

Angka kemiskinan di kota Kediri dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tingkat kemiskinan di kota Kediri ini terlihat pada tahun 2012 dari pengangguran penduduk yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Dampak dari pengangguran tersebut dikarenakan tidak adanya keterampilan yang dibekalinya hingga pada akhirnya dari mereka ada yang melakukan tindakan perampokan, gelandangan hingga ada yang berprofesi menjadi pelacur. Dari hal tersebut mengakibatkan angka kriminalitas yang disebabkan dari kemiskinan di Kediri semakin banyak. Banyaknya angka pengangguran dapat dilihat dari tabel jumlah dan presentase penduduk miskin di Kota Kediri.

3. Perilaku Menyimpang Dari Prostitusi Terhadap Kenakalan Remaja

Prostitusi merupakan perilaku yang melanggar aturan – aturan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Keberadaan prostitusi di kota Kediri dapat mempengaruhi aspek pendidikan salah satunya remaja yang masih berstatus sekolah. Tindakan kriminalitas yang dipengaruhi adanya prostitusi tersebut cenderung berdampak pada remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Para remaja yang masih sekolah juga ada yang terlibat sebagai pelaku terhadap tindakan prostitusi dengan menjual diri mereka untuk mendapatkan imbalan berupa uang.

Prostitusi kini tidak mengenali jenis umur, ada beberapa dari remaja sekarang ini di kota Kediri yang terlibat jasa penjualan diri dengan melacur. Dari data yang diperoleh berupa wawancara dengan mbak P hasil datanya menyatakan sebagai berikut

Tabel 5.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Kediri

Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)	Garis Kemiskinan
2012	22300	8.11	0.82	0.14	316693

Ada mas anak yang berumur 19-an tahun, 17- an tahun, baru bikin KTP langsung mas.¹⁵

Maksud dari perolehan data berupa wawancara tersebut diatas menjelaskan bahwa remaja yang sudah berumur tersebut sudah bisa melakukan tindakan prostitusi atau pelacur. Factor yang mendasari anak tersebut bisa melakukan tindakan yang menyimpang berupa pelacur bisa saja terjadi ketika anak tersebut tidak mendapatkan perhatian sama sekali oleh keluarganya, dan bisa saja kalau kedua orang tuanya broken home atau cerai seingga menjadikan anak tersebut frustrasi karena yang di idolakan dari orang tuanya tersebut tidak ada dukungan sama sekali untuk anaknya, sehingga anak tersebut cenderung melampiaskan permasalahannya dan terjun kepada tindakan yang menyimpang salah satunya prostitusi atau pelacuran. Pada akhirnya remaja yang sudah mengetahui dunia prostitusi lebih cenderung tertarik terhadap pekerjaan prostitusi, karena pekerjaan tersebut lebih mudah dilakukan dan menghasilkan upah yang begitu besar untuk kebutuhan sehari – harinya.

Gambar 5.1 Wanita Tuna Susila Di Komplek

Lokalisasi Semampir



Sumber Gambar diakses di

<https://madiun.solopos.com/read/20150204/516/574293/prostitusi-kediri-masih-ada-wts-di-semampir-kediri>

Dari perolehan gambar.1 tersebut yang didapatkan dari akses media internet, merupakan potret wanita tuna susila yang berada di lokalisasi Semampir. Wanita tuna susila tersebut yang berada di gambar terlihat sedang menunggu tamunya.

Keberadaan pelacuran di lokalisasi Semampir ini dilihat dari para pelacur yang berparas cantik dan muda, namun ada juga yang sudah tua dan sudah ibu – ibu yang menjadi lonte atau cabo ini. Besaran atau tarif yang mereka kenakan bervariasi dan beraneka ragam, terlihat dari postur tubuh dan usianya. Jika usianya tergolong masih muda sekitar umur 18 tahunan tariff yang di kenakan sebesar Rp 500.000,- sedangkan yang sudah tua atau yang ber umur 30 tahun keatas tariff yang dikenakan sekitar Rp 50.000,- hingga Rp 200.000,- itupun juga dapat dilihat dari kelas – kelas yang ditawarkannya oleh para germo atau mucikarinya terhadap konsumen hidung belang yang ingin mencobanya.

Di lokalisasi Semampir juga terdapat tempat hiburan berupa tempat karaoke yang disediakan untuk para pengunjung. Tempat hiburan yang disediakan juga

dilengkapi beberapa minuman – minuman yang mengandung alkohol atau minuman keras.

Gambar 5.2 Tempat hiburan karaoke di lokalisasi Semampir



Sumber gambar diakses di

<http://www.andikafm.com/news/detail/8465/1/tutup-lokalisasi-pemkot-kediri-siapkan-dana-rp-3-milyar>

Dari perolehan gambar.2 yang didapatkan dari akses media internet menunjukkan potret berupa ruangan tempat hiburan karaoke yang berlabel minuman keras yang berada di lokalisasi Semampir. Tempat hiburan yang disediakan di lokalisasi Semampir ini beraneka ragam. Ada beberapa tempat hiburan karaoke di lokalisasi Semampir ini yang mewah terdapat penjualan minuman keras yang berlabel Bintang Pillsener, namun ada juga tempat hiburan karaoke lainnya yang menyediakan minuman keras tapi cenderung minuman keras yang berbentuk oplosan.

Para konsumen atau pria hidung belang yang mendatangi komplek lokalisasi Semampir secara umumnya sudah disediakan menu pilihan oleh germo atau mucikarinya untuk memilih para wanita berparas cantik yang sudah ditetapkan oleh para germonya tersebut. Pilihan menu yang sudah disediakan sudah termasuk satu paket seperti ruangan karaoke dengan penjamuan satu wanita PSK yang menemaninya. Seperti contohnya ruangan Srikandi yang membandrol harga Rp 500.000,- ruangan tersebut merupakan ruangan kelas eksekutif yang disediakan para germo untuk para tamunya yang berkunjung.

Dari penjelasan tersebut di atas terdapat data yang diperoleh berupa data hasil wawancara dengan nama mbak P, data tersebut menyatakan sebagai berikut:

Kalau yang di Srikandi itu terdapat anak perempuan yang masih muda – muda mas, agak muda, kalau yang Rp 150 Ribuan itu yang ibuk – ibuk. Dan di Srikandi harganya Rp 500 Ribu mas, situ yang sudah kelasnya eksekutif.¹⁶

Dari hasil perolehan data tersebut berupa perolehan data wawancara dengan mbak P, menyatakan jika terdapat perbedaan harga. Perbedaan harga tersebut sesuai dengan usia para PSKnya dan tarif yang diberikannya oleh germo. Semakin tua usia PSK tersebut semakin murah tariff yang diberikannya. Hal ini juga menyesuaikan isi kantong dari para pengunjung pria hidung belangnya yang hendak

¹⁵ Wawancara dengan mbak “P” di rumah Bapak Agus Karwiyanto.

¹⁶ Wawancara dengan mbak “P” di rumah Bapak Agus Karwiyanto.

mencoba menyewa para PSK tersebut yang berada di kompleks lokalisasi Semampir Kediri.

D. Dampak Ekonomi Dari Prostitusi

Prostitusi dari pandangan sosial merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi keberadaan prostitusi di lokalisasi Semampir ini justru membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tinggal di area lokalisasi. Banyak dari warga lokalisasi yang sudah menetap bertahun – tahun di area kompleks menggantungkan hidupnya dengan berjualan kecil – kecilan, seperti menyediakan jasa pencucian baju atau laundry, ada juga yang membuka toko peracangan yang isinya menjual kebutuhan pokok seperti sembako, ada juga yang berjualan warung nasi, bahkan ada juga yang berjualan obat kuat dan berbagai macam alat perangsang atau alat kontrasepsi.

Para warga yang tinggal sudah sejak lama yang berada di lokalisasi Semampir ini, merupakan warga yang terdampak atau warga yang berada di SHP atau sertifikat hak pakai. Keberadaan mereka di lokalisasi hanya menggantungkan dari hasil pendapatan kompleks. Namun keberadaan mereka nantinya suatu saat akan terganggu jika tanah atau lahan sewa mereka akan diambil alih oleh pemerintah Kota Kediri suatu saat. Status tempat tinggal yang mereka tempati di lokalisasi Semampir setiap bulannya dikenakan pajak retribusi daerah. Besaran pajak retribusi daerah dilihat dari luas tanah dan setiap per/M² dikenakan biaya sebesar lima ratus rupiah per tahun. Sesuai data yang diperoleh, terdapat sampel data berupa tabel nama – nama penyewa lahan dan besaran tarif yang harus di bayarnya.

Tabel 5.3 Data berupa sampel Nama-Nama Warga Yang Menempati Sewa Tanah Di Lokalisasi Desa Semampir Tahun 2012 Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No	Nama	Alamat	NPWPD	Luas/ M2	Harga /M2	Bulan	Jumlah
1	Agus Hariyanto	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011153,02,01	62	500	12	372000
2	Yuli Purwito	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011144,02,01	49	500	12	294000
3	Suliyati/ Suliyah	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011160,02,01	46	500	12	276000
4	Adi Sutrisno	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011177,02,01	71	500	12	426000
5	Sartini	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011163,02,01	80	500	12	480000
6	Suprihatin	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011188,02,01	51	500	12	306000
7	Anis	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011145,02,01	40	500	12	240000
8	Lilik Mudianti	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011189,02,01	63	500	12	378000
9	Ponijah	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011152,02,01	61	500	12	366000
10	Kasiani	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011169,02,01	114	500	12	684000
11	Lasimin	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011182,02,01	29	500	12	174000
12	Khoiri	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011156,02,01	61	500	12	366000
13	Alhmad Bakri	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011146,02,01	44	500	12	264000

14	Sasminto	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011149,02,01	47	500	12	282000
15	Suyanto	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011183,02,01	45	500	12	270000
16	Sukir	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011178,02,01	84	500	12	504000
17	Nurudin	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011140,02,01	113	500	12	678000
18	Wasiat Widodo	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011194,02,01	62	500	12	372000
19	Kusni	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011180,02,01	26	500	12	156000
20	Warni	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011132,02,01	28	500	12	168000
21	Ponidjan	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011159,02,01	62	500	12	372000
22	Agus Hariyanto	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011116,02,01	54	500	12	324000
23	Agus Mayanto	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011148,02,01	117	500	12	702000
24	Widijati	RT 32, RW 05 Semampir	2,0011128,02,01	55	500	12	330000
JUMLAH TOTAL							8784000

Dari hasil data yang diperoleh berupa sampel tabel yang berisi struktur dan besaran tarif pajak retribusi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mereka tiap tahunnya. Data berupa sampel tersebut diatas diambil pada penduduk warga RT 32 RW 05 Kelurahan Semampir Kota Kediri.

Para warga yang berada dan menempati lahan sewa di lokalisasi Semampir tersebut begitu sangat kecil untuk membayar lahan tiap tahunnya, karena pendapatan mereka per harinya melebihi dari pajak yang dikenakan pemerintah per tahunnya dari usaha mereka yang berada di lingkup kawasan lokalisasi Semampir. Hingga mereka bisa meraup keuntungan per harinya bisa sampai 3 sampai 4 juta per harinya dengan melakukan jasa pelayanan prostitusi. Selain mereka membuka layanan prostitusi, mereka juga mendapatkan keuntungan dari tempat usahanya yaitu tempat karaoke. Pendapatan mereka dari tahun – ketahun semakin besar hingga mereka bisa mendirikan bangunan bertingkat dan mempercantik tempat usahanya.

E. Dampak Lingkungan Yang Ditimbulkan Dari Perilaku Prostitusi

1. Kebijakan Pemerintah Menggusur Komplek Lokalisasi Prostitusi

Kebijakan Pemerintah Kota Kediri menindak lanjuti kasus prostitusi yang berada di Kelurahan Semampir mendapat ancaman dari warga kompleks lokalisasi. Ancaman dari warga berupa penolakan lahan mereka yang akan digusur oleh Pemerintah mulai dilakukan warga terlihat mulai sejak periode tahun 2014 - 2016 sebelum menjelang penggusuran. Adapun ancaman yang dilakukan oleh warga lokalisasi di Semampir terdapat

demo yang ditujukan kepada walikota Kediri di gedung DPRD Kota Kediri.

Gambar 5.3 Aksi demo warga menolak pengusuran kompleks lokalisasi yang dilakukan warga lokalisasi Semampir terhadap Walikota Kediri



<https://regional.kompas.com/read/2014/08/28/13521291/wanita-wanita.Seksi.Jogjet.di.Gedung.Wakil.Rakyat>

Dari perolehan gambar 3 yang diakses melalui sumber media internet, menunjukkan potret bahwa aksi yang dilakukan warga lokalisasi Semampir terlihat emosi. Emosi yang diungkapkan oleh warga lokalisasi Semampir dapat dilihat dari beberapa poster yang ditunjukkan, bahwa mereka secara keras menolak pengusuran dan membela tempatnya supaya terbebas dari tindakan dan wewenang oleh walikota Kediri terhadap pengusuran tempat tinggal mereka.

Pada periode Walikotanya yang dijabat oleh Bapak Abdullah Abu Bakar S.E. Pemberlakuan dan penetapan pengusuran oleh Pemerintah Kota Kediri ini dilandasi peraturan hukum yang berlaku sebelumnya, mengingat peraturan daerah pada tahun 1998 yang berisi memberantas pelacuran di tingkat kotamadya ini sebagai pedoman yang kuat dan sebagai bukti untuk segera mengentaskan kasus tindakan prostitusi yang masih berada di Semampir.

Tindakan yang tegas dari Pemerintah Kota Kediri ini yang dijabat oleh Abdullah Abu Bakar S.E menjadi sorotan publik, karena baru terdapatnya Pemerintah yang berani dan secara tegas mengambil alih dan mengambil resiko atas pengentasan prostitusi di Kota Kediri. Adapun perolehan sumber data berupa surat lampiran dari Dinas Sosial yang berisi keputusan Walikota Kediri, perolehan lampiran datanya berupa:

*Bahan Rapat Koordinasi Persiapan Audiensi Walikota Kediri Dengan Perwakilan Warga Kelurahan Semampir Dalam Rangka Penanganan Alih Fungsi dan Penertiban Lahan Aset PEMKOT di RW 005 Kelurahan Semampir Kota Kediri.*¹⁷

a. Dasar Hukum:

- *Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor II Tahun 1957 Tentang Pemberantasan Pelacuran*

Dalam Kotamadya Daerah Kotamadya Tingkat II Kediri;

- *Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 10 Nopember 2010 Nomor: 460/16474/031/2010 perihal: Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Women Trafficking;*
- *Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 460/15612/031/2011 perihal: Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur;*
- *Surat Gubernur Nomor 460/7705/031/2014 tertanggal 28 April Tahun 2014 Perihal: Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa Timur;*
- *Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 460/6722/031/2015 tertanggal 6 April Tahun 2015 Perihal: Penanganan Pasca Penutupan Lokalisasi WTS di Jawa Timur (yang baru di terima tanggal 01 Oktober 2015)*
- *Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 460/14829/031/2016 tertanggal 9 September 2016 Perihal: Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Praktek Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi.*
- *SHP Nomor 17 Tahun 1986 seluas 15.120 M² lokasi sebelah utara barak.*
- *SHP Nomor 50 Tahun 2001 seluas 13.925 M² lokasi pemukiman warga eks lokalisasi / selatan Jembatan.*
- *SHP Nomor 52 Tahun 2001 seluas 7.265 M² lokasi utara Jembatan Belakang Vihara bekas kandang Babi.*

Merujuk perolehan sumber data tersebut diatas yang sudah dipaparkan, pembahasan yang pertama terdapat penjelasan berupa peraturan daerah Kotamadya tahun 1957 namun ada pergantian tahun berupa salinan yang sama yaitu perubahan kedua berupa Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan untuk menutup kawasan kompleks lokalisasi Semampir tahun 1998. Jadi penutupan lokalisasi Semampir telah diresmikan untuk ditutup mulai sejak tahun 1998.

Pada tahun 1998 telah resmi ditutup, namun pada tahun penutupan ini masih belum adanya tindakan yang tegas dan hanya peraturan daerah saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, sehingga kawasan lokalisasi ini mulai beroperasi dan berjalan lagi hingga seterusnya dan berakhir di tahun 2016 berupa pengusuran. Dari proses tindakan sebelum pengusuran ini masih terdapat peraturan – peraturan dari surat Gubernur Jawa Timur yang dikeluarkan mulai tanggal 10 Nopember 2010 Nomor 460/16474/031/2010 yang berisi tentang *pencegahan dan penanggulangan prostitusi serta women trafficking*, serta terdapat surat peraturan dari Gubernur Jawa Timur yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 460/15612/031/2011 yang berisi tentang *penanganan lokalisasi WTS di Jawa Timur*, serta terdapat surat peraturan dari Gubernur Jawa Timur yang ketiga pada tanggal 24 April 2014 dengan nomor 460/7705/031/2014 yang berisi *penanganan lokalisasi WTS di Jawa Timur*,

¹⁷ Sumber Arsip Dinas Sosial. *Bahan Rapat Koordinasi Persiapan Audiensi Walikota Kediri Dengan Perwakilan Warga Kelurahan Semampir.*

serta surat dari Gubernur Jawa Timur pada tanggal 6 April

Wilayah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
RT 29	43 KK	104 Jiwa
RT 30	54 KK	150 Jiwa
RT 31	90 KK	241 Jiwa
RT 32	74 KK	187 Jiwa
Jumlah	261 KK	682 Jiwa

2015 dengan nomor 460/6722/031/2015 yang berisi penanganan pasca penutupan lokalisasi WTS di Jawa Timur, yang surat ini baru direalisasi dan diterima oleh Pemerintah Kota Kediri pada tanggal 1 Oktober 2015, dan surat yang terakhir dari Gubernur Jawa Timur Nomor 460/14829/031/2016 tertanggal 9 September 2016 yang berisi Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Praktek Prostitusi Pasca Penutupan Lokalisasi.

Dari beberapa pernyataan surat tersebut dari Gubernur Jawa Timur sebagai alas hukum Walikota Kediri untuk menindak lanjuti penutupan dan pemberantasan yang berujung pengusuran kawasan kompleks lokalisasi WTS di Kelurahan Semampir Kota Kediri. Adapun beberapa aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah kota Kediri berupa tabel

yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Daftar Lahan Yang berstatus SHP Milik Pemerintah Kota Kediri di Kelurahan Semampir

No	Kategori Sertifikat	Luas Lahan	Letak Lokasi
1	SHP Nomor 17 Tahun 1986	15.120 M ²	Berlokasi disebelah utara Barak
2	SHP Nomor 50 Tahun 2001	13.925 M ²	Berlokasi di pemukiman warga eks lokalisasi yang berada di selatan jembatan
3	SHP Nomor 52 Tahun 2001	7.265 M ²	Berlokasi di utara jembatan belakang Vihara bekas kandang babi.
Total Keseluruhan Dari Luas Lahan Yang Berada di Lokalisasi WTS di Kelurahan Semampir		36.310 M²	

Menurut sumber data yang diperoleh diatas berupa tabel, berdirinya lokalisasi Semampir tersebut memiliki lahan seluas 36.310 M², dari SHP Nomor 17 Tahun 1986 memiliki luas 15.120 M² dengan kategori lokasi sebelah utara barak, dan SHP Nomor 50 Tahun 2001 memiliki luas 13.925 M² dengan kategori lokasi pemukiman warga eks lokalisasi yang berada di selatan Jembatan sedangkan untuk SHP Nomor 52 tahun 2001 memiliki luas 7.265 M² yang berlokasi di utara Jembatan Belakang Vihara bekas tempat kandang Babi. Dari data tersebut terdapat tiga lokasi tempat yang sama lokasinya, namun yang diambil dan dijadikan target Pemerintah untuk digusur yaitu tempat yang dijadikan praktik prostitusi yang berada di

SHP Nomor 50 tahun 2001 yang luasnya 13.925 M² letaknya berada di Semampir RW 05, RT 29,30,31, dan 32, adapun data warga secara detail yang berada di SHP Nomor 50 tahun 2001 yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5.5 Data Warga yang berada di SHP Nomor 50 tahun 2001

Tabel Keterangan Data Warga yang berada di SHP Nomor 50 tahun 2001 Tabel 5.6 Jumlah KK Di Wilayah RT 29 Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah dan Kepemilikan Rumah Di Luar Eks Lokalisasi

Status Kepemilikan	Punya Rumah di Eks Lokalisasi	Tidak Punya Rumah Di Luar Eks Lokalisasi	KETERANGAN
Tanah Aset Pemkot	5 KK	35 KK	❖ Sebagian Bangunan di Lahan Aset dan Sebagian lain SHM (SULKAN)
Tanah BBWS Jatim	-	2 KK	
SHM	-	1 KK	
Jumlah	10 KK	78 KK	Total : 90 KK

Tabel 5.7 Jumlah KK Di Wilayah RT 30 Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah dan Kepemilikan Rumah Di Luar Eks Lokalisasi

Status Kepemilikan	Punya Rumah di Eks Lokalisasi	Tidak Punya Rumah Di Luar Eks Lokalisasi	KETERANGAN
Tanah Aset Pemkot	25 KK	20 KK	❖ 1 KK yang menempati tanah aset meninggal dunia (Lilik Yuwana)
Tanah BBWS Jatim	1 KK	2 KK	
SHM	5 KK	-	❖ Sebagian Bangunan di lahan Aset dan Sebagian lain SHM
Jumlah	31 KK	22 KK	Total : 54 KK

Tabel 5.8 Jumlah KK Di Wilayah RT 31 Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah dan Kepemilikan Rumah Di Luar Eks Lokalisasi

Status Kepemilikan	Punya Rumah di Eks Lokalisasi	Tidak Punya Rumah Di Luar Eks Lokalisasi	KETERANGAN
Tanah Aset Pemkot	8 KK	56 KK	❖ 1 KK an. SUPINI tidak ada keterangan kepemilikan rumah
Tanah BBWS Jatim	-	11 KK	
SHM	2 KK	11 KK	

			❖ 1 KK a.n SAMIDI tabahan baru (Kost)
Jumlah	10 KK	78 KK	Total: 90 KK

Tabel 5.9 Jumlah KK Di Wilayah RT 32 Berdasarkan Status Kepemilikan Tanah dan Kepemilikan Rumah Di Luar Eks Lokalisasi

Status Kepemilikan	Punya Rumah di Eks Lokalisasi	Tidak Punya Rumah Di Luar Eks Lokalisasi	KETERANGAN
Tanah Aset Pemkot	-	39 KK	❖ 8 KK Tanah Aset tdk ada penjelasan kepemilikan rumah di luar Eks Lokalisasi ❖ 5 KK tanah pribadi tdk ada keterangan kepemilikan rumah di luar Eks Lokalisasi ❖ 5 KK kost atau kontrak ❖ 1 KK misah KK ❖ 3 KK tidak ada Keterangan
Tanah BBWS Jatim	-	3 KK	
SHM	1 KK	5 KK	
Jumlah	1 KK	47 KK	Total : 74 KK

Dari total warga yang berada di SHP 50 tahun 2001 tercatat penduduknya sejumlah 261 KK terdapat 682 jiwa yang menduduki lahan seluas 13.925 M² dengan status tanahnya berupa pemukiman warga eks lokalisasi yang berada di selatan jembatan ini yang akan diberlakukan pengusuran Pemerintah Kota Kediri yang dijabat oleh Abdullah Abu Bakar S.E. Data warga tersebut merupakan warga yang statusnya terdampak dari pengusuran.

Sebelum dilakukannya pemggusuran oleh Pemerintah Kota Kediri beserta tim dari jajaran instansi pemerintah yang terkait, seperti Dinas Sosial memberikan beberapa program yaitu berupa keterampilan pelatihan kerja untuk para warga yang berada di lokalisasi Semampir dengan tujuan supaya para warga setelah bebas atau keluar dari lingkungan lokalisasi bisa membuka pekerjaan yang telah diberikan untuk menyambung hidup mereka nantinya.

b. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2014 s.d tahun 2016.

Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan (Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016) antara lain:

- 1) *Mempersiapkan warga terdampak melalui pelatihan keterampilan, bantuan alat usaha serta*

menyalurkan bantuan kelayakan hidup sebesar Rp. 500.000,- per Kartu Keluarga dalam kurun waktu per bulan selama 1,5 Tahun.

- 2) *Pelaksanaan razia secara intensif*
- 3) *Tidak menarik retribusi sewa*
- 4) *Rapat koordinasi secara intensif yang melibatkan instansi samping.*
- 5) *Rapat koordinasi antara instansi terkait bersama BPN pada tanggal 11 Agustus 2016 di ruang Kilisuci. Dalam rapat koordinasi tersebut telah dibahas mengenai kepastian hukum kepemilikan lahan Pemkot berdasarkan SHP Nomor 17 Tahun 1986, SHP Nomor 50 Tahun 2001, SHP Nomor 52 Tahun 2001.*

Dari perolehan data berupa hasil program kerja yang telah disusun oleh tim Dinas Sosial dan telah disetujui oleh Pemerintah Kota Kediri yang berisi program dan kegiatan untuk menangani kasus prostitusi serta warga yang terdampak di kawasan kompleks Semampir, telah dipersiapkan mulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 menjelang pengusuran, seperti yang tercantum diatas adanya pemberian pelatihan kerja serta bantuan untuk modal usaha mereka dan diberinya bantuan kelayakan hidup mereka sebesar Rp 500.000,- yang tercatat selama 1,5 tahun per bulan.

Tujuan pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Dinas Sosial ini supaya mereka beralih profesi dari yang sebelumnya menyimpang dari pekerjaan sebagai jasa pelayanan prostitusi, kini dialihkan untuk kerja yang layak dan tidak melakukan tindakan penyimpangan lagi. Banyak tahapan – tahapan dan cara yang harus dilakukan satu persatu oleh Pemerintah Kota Kediri yang di naungi oleh tim Dinas Sosial untuk merubah cara hidup dari pekerjaan mereka, salah satunya memberikan sumbangan berupa pelatihan kerja dan sumbangan untuk kelayakan hidup sementara. Selain itu terdapat kebijakan dari Pemerintah Kota Kediri yaitu tidak menarik retribusi sewa.

Pemerintah Kota Kediri setelah menetapkan lokalisasi Semampir sebagai tempat bangunan sewa wajib pajak retribusi untuk para WTS dimulai sejak tahun 1960 hingga berakhir pada tahun 2014. Penetapan memberhentikan tarif sewa atau retribusi pajak terdapat alasan dari Pemerintah Daerah karena tempat tersebut sebelumnya telah menyalahi aturan dan sebagai tempat untuk melakukan tindakan sebagai kegiatan prostitusi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah telah memberhentikan tarif sewa berupa retribusi pajak yang nantinya bangunan atau tempat tinggal mereka para WTS akan digusur, dan mereka tidak dapat beroperasi setelah tempat tersebut digusur. Selain itu dari isi data yang ada terdapat pelaksanaan razia secara intensif.

Setelah para warga lokalisasi telah dibubarkan dan tempat tinggalnya digusur oleh Pemerintah sesuai peraturannya yang telah ditetapkan, terdapat razia secara intensif dari pihak tim keamanan seperti Satpol PP untuk meninjau beberapa titik lokasi yang rawan terjadinya praktik prostitusi seperti hotel, kos – kosan, tempat hiburan, serta warung atau café yang berada di Kota

Kediri. Razia secara intensif ini nantinya dilakukan setelah proses penggusuran selesai. Tujuan diadakannya razia secara intensif ini supaya wilayah Kota Kediri bebas dari adanya tempat prostitusi lagi.

Adapun razia intensif yang dilakukan oleh tim keamanan dari Satpol PP Kota Kediri ini mengupayakan tidak terjadi lagi praktik prostitusi liar yang menyebar setelah proses penggusuran. Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP ini menyusuri beberapa tempat – tempat yang rawan terjadi hal praktik prostitusi seperti di Kos – kosan seluruh Kota Kediri, Hotel, dan tempat hiburan malam seperti café, taman alun – alun, dan diskotik. Seperti contohnya pada gambar 4.

Gambar 5.4 Razia intensif dari Satpol PP yang dilakukan di Kos – Kosan.



Sumber gambar diakses di <https://www.bangsaonline.com/berita/18359/razia-kos-kosan-di-kota-kediri-tiga-pasangan-mesum-diamankan-satpol-pp>

Dari perolehan gambar 4 yang diakses melalui sumber media internet, menunjukkan potret bahwa anggota dari Satpol PP sedang meninjau tempat kos – kosan yang dicurigai menjadi tempat prostitusi liar. Dari potret gambar tersebut terlihat dua gadis ABG sedang didata dan dimintai status keterangannya oleh anggota Satpol PP.

c. Konflik Penolakan Penggusuran Dari Aksi Warga Lokalisasi Semampir Terhadap Pihak Tim Keamanan.

Kasus yang terjadi ketika Pemerintah memutuskan untuk menggusur rumah warga terdampak yang berada di lokalisasi Semampir telah membuat warga lokalisasi resah hingga warga sampai memutuskan niatnya untuk menolak penggusuran tempat tinggalnya. Penolakan penggusuran tersebut disertai aksi demo warga dengan menggunakan bambu runcing dan bom molotov yang sudah disiapkan warga lokalisasi sendiri untuk melawan pihak tim gabungan keamanan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI. Namun aksi warga yang akan melawan tim Keamanan yang bertugas mengamankan jalannya penggusuran ini akhirnya telah diamankan senjata – senjata mereka oleh pihak tim gabungan keamanan.

Menurut data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Endro Laksono selaku bagian Intelkam dari tim keamanan dari Polresta Kediri menyatakan:

Ya pada awalnya ada suatu perlawanan dari mereka buat bambu runcing. Namun kami pun juga tidak kalah sigap pada waktu itu sebelum dilaksanakannya eksekusi ada warga yang menggunakan bambu runcing dan bom molotov yang di tuturkan oleh pihak kami sendiri pihak intel. Ya, kalau saya bilang lembaga LSM bukan karena dia tidak punya lembaga yang resmi. Karena apa, mereka memang sering-sering dia aktivis, dan sering bergabung ke LSM, akan tetapi dia tidak masuk ke salah satu organisasinya LSM tersebut. Dan dia selama ini selaku pemangku keamanannya, keamanan lokalisasi semampir sendiri katakanlah satpamnya lokalisasi dan dia tidak ada identitas secara resmi yang di tunjukkan. Jadi dia itu bisa dikatakan tunjungan illegal yang ditunjuk masyarakat lokalisasi semampir selaku keamanannya. Tugasnya untuk melindungi warga lokalisasi Semampir dari masa penggusuran yang dilakukan oleh pihak kami Polres Kediri Kota selaku keamanan yang di utus oleh Pemerintah Kediri kota secara langsung dan tersurat.¹⁸

Konflik yang timbul dari warga lokalisasi tersebut ternyata ada yang memelopori dari LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Kemudian LSM tersebut ditangkap dan diamankan oleh jajaran tim keamanan, karena LSM yang menjadi tokoh dari warga lokalisasi yang menimbulkan suatu gesekan masalah antara warga lokalisasi dan tim gabungan keamanan. Hingga akhirnya proses penggusuran ini dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016. Proses pelaksanaan penggusuran tersebut menunggu rumah warga benar - benar kosong dan baru dilaksanakan penggusuran.



¹⁸ Wawancara dengan pihak kepolisian Bagian Intelkam dengan Bapak Endro Laksono, wawancara dilakukan di kantor Polresta Kediri Kota

Gambar 5.5 Aksi perlawanan warga lokalisasi Semampir kepada aparat keamanan.

Sumber gambar diakses di

<https://www.merdeka.com/peristiwa/lokalisasi-semampir-digusur-polisi-sita-bambu-runcing-bom-rakitan.html>

Dari perolehan gambar 5 yang diakses melalui sumber media internet, menunjukkan potret bahwa dari tim keamanan Polres Kediri Kota telah mengamankan beberapa benda yang berbahaya, seperti bambu runcing dan bom molotov yang telah diamankan. Tindakan warga lokalisasi Semampir ini terlihat berbahaya karena terdapat indikasi yang menjadi pelopor warga untuk melakukan aksi perlawanan terhadap tim gabungan keamanan.

2. Dampak Positif Pasca Penggusuran Komplek Lokalisasi Prostitusi Di Semampir

Dampak positif setelah penggusuran komplek lokalisasi Semampir yaitu kota Kediri terbebas dari adanya praktik prostitusi, dan adanya ruang lahan kosong bekas bangunan komplek yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau. Pembuatan RTH ini sebagai pusat keindahan kota dan pusat taman masyarakat kota Kediri untuk bersantai. Berakhirnya komplek lokalisasi Semampir ini dapat menghambat tekanan dari banyaknya penyakit yang ditularkannya seperti HIV/AIDS oleh para pelaku pekerja prostitusi sebelumnya. Dampak positif selanjutnya dari adanya penggusuran lokalisasi tersebut berakhir atau dilynepkan, maka pengaruh kenakalan remaja semakin berkurang seperti mereka yang sebelumnya mengetahui adanya tempat lokalisasi di Semampir mereka cenderung berpengaruh terhadap tindakan kriminalitas yang disebabkan oleh praktik prostitusi. Pemerintah Kota Kediri memiliki maksud dan tujuan dari penggusuran tersebut supaya permasalahan prostitusi di Kota Kediri semakin berkurang dan tidak terjadi lagi komplek lokalisasi untuk praktik prostitusi.

3. Dampak Negatif Pasca Penggusuran Komplek Lokalisasi Prostitusi Di Semampir.

Dampak negatif yang terjadi setelah penggusuran komplek lokalisasi Semampir yaitu semakin menyebarnya pekerja prostitusi atau PSK ketempat lain. Banyak dari mereka para pekerja dari mantan lokalisasi Semampir ini sudah membuka praktik prostitusi secara online. Para mantan pekerja prostitusi di Kota Kediri yang berasal dari lokalisasi Semampir ini justru cenderung bermukim ditempat warga – warga sekitar di Kota Kediri seperti mereka menginap di kos – kosan dekat dengan rumah penduduk warga untuk tempat tinggalnya. Dari pekerjaan yang dulunya sebagai WTS yang berada di lokalisasi semampir, sekarang dari mereka ada yang berprofesi dan bekerja sebagai sales produk alat kesehatan ada juga yang menawarkan produk rokok yang ditawarkannya secara langsung di warung – warung yang berada di Kota Kediri, pekerjaan mereka hanya sebagai sampingan yang hanya bermodalkan penampilan cantik dan bermodalkan rayuan

untuk menawarkan produk yang ditawarkannya. Namun dari pekerjaan mereka hanya sebagai kedok untuk menutupi jati diri mereka yang sebelumnya berprofesi sebagai pelacur atau PSK. Dari pembahasan tersebut terdapat data berupa wawancara dari Bu Dewi Sartika selaku mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri yang menyatakan:

Ya gini, jadi semua itu kita antisipasi, jadi gini wong jenenge PSK dimana pun koyok plendungan, di plites nek kene mletos ndek kono, di plites ndek kene mletos ndek kono, ya memang iya, tapi kita sudah mempunyai suatu hollistik kegiatan jadi memang kegiatan kita kan terpadu, tapi kan sudah bukan tugasnya Dinas Sosial lagi, tapi tugasnya Satpol PP. Biasanya yang kerjanya sales lah itu wes kita bintang kita kasih penandaan. Kalau wes sales berarti itu wes ada sangkut paute karo PSK.¹⁹

Dari hasil perolehan data berupa wawancara tersebut diatas, maka adanya profesi pelacuran tersebut tidak bisa di hilangkan melainkan bisa dicegah. Pencegahan yang bisa diatasi salah satunya menghilangkan sarang mereka seperti terdapatnya komplek lokalisasi. Namun dampak yang dirasakan setelah digusurnya komplek lokalisasi Semampir ini yang terjadi, semakin banyak dan menyebarnya PSK yang menjamuri Kota Kediri. Akan tetapi dari tim pihak keamanan Satpol PP sendiri sering beroperasi ketempat – tempat yang paling rawan untuk melakukan tindakan – tindakan kejahatan salah satunya prostitusi. Menurut data yang diperoleh berupa wawancara dari Satpol PP yang bernama Bu Rina menyatakan sebagai berikut.

Pasti ada mas, karena setelah kami melaksanakan penggusuran, kami langsung berfikir pasca penggusuran itu, karena mereka yang tinggal di Lokalisasi kan seperti mes mereka (untuk melakukan jasa pelayanan Sex's bagi para PSK nya). Jadi mereka bertebaran dimana-mana, jadi setelah pasca penggusuran ini tingkat peredaran prostitusi di Kota Kediri semakin meningkat yang masuk seperti di Kost, Hotel, Kontrakan, bahkan tempat hiburan, dan mohon ma'af mas bahkan sampai ada juga di tempat umum pun dijadikan sebagai pelayanan Sex's mereka, seperti yang kemarin baru juga terdapat informasi kejadian bahwa di Jalan Pajang Gudang Garam Kota Kediri di Unit 09 itu kami mengamankan seorang PSK istilahnya dia sedang menjamu tamu di tempat itu. Hal ini diakibatkan karena efek dari pasca penggusuran tingkat populasinya semakin naik. Selain itu juga kami temukan di kos-kosan di daerah pesantren itu. Tingkat signifikannya naik 25 % pasca penggusuran, dikarenakan perkembangannya pesat ini juga terdapat layanan prostitusi Online bagi mereka para PSK Semampir.²⁰

Dari data yang diperoleh berupa hasil wawancara tersebut, adanya operasi atau sidak yang sering dilakukan oleh pihak keamanan Satpol PP yang terdapat peningkatan prostitusi di Kediri semakin besar setelah dilakukan penggusuran, bahkan ada yang sampai dari mereka atau para pekerja prostitusi yang melakukan pelayanan di tempat umum yang berada di area pabrik rokok PT Gudang

¹⁹ Wawancara dengan Bu Dewi Sartika, Mantan Kepala Dinas Sosial, Wawancara dilakukan di Kantor Bu Dewi Sartika yang berada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Kediri

²⁰ Wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Kediri, Lokasi Wawancara di tempat Kantor Satpol PP.

Garam yang tepatnya di jalan pajang. Dari penggusuran kompleks lokalisasi Semampir tersebut menjadikan dampak negative yang dirasakan oleh masyarakat kota Kediri, karena dari kehadiran mantan para PSK Semampir dapat menyebabkan pengaruh hal yang buruk terhadap lingkungan tempat tinggal masyarakat sekitarnya. Hal buruk yang bisa saja terjadi yaitu lingkungan masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan praktik prostitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap kajian perkembangan prostitusi di Kota Kediri ini diawali tahun 1960 hingga berakhir pada tahun 1998. Asal mula prostitusi di Kota Kediri ini berawal dari prostitusi liar yang berpusat di taman kota atau alun – alun Kediri. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu terdapat kebijakan dari pemerintah kota Kediri berupa tindakan penanganan para prostitusi yang liar tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri pada tahun 1968-an diawali musyawarah dengan seluruh Lurah Kota Kediri yang membahas pengadaan tempat untuk menampung para prostitusi liar. Pada akhirnya ditemukan tempat berupa lahan di Desa Semampir. Lahan di lokalisasi Semampir berupa tanah gendom atau tanah Kota Praja.

Perkembangan lokalisasi Semampir ini dari tahun ketahun terjadi perubahan. Perubahan yang berada di lokalisasi Semampir ini dapat dilihat dari perkembangannya berupa penamaan julukan kompleks. Keberadaan prostitusi di lokalisasi Semampir tersebut dari dekade mengalami perkembangan baik berupa banyaknya PSK yang berdatangan dan bentuk bangunan kompleks. Namun dari perkembangan lokalisasi Semampir ini telah usai karena terdapat penutupan yang dikeluarkan pemerintah Kota Kediri berupa Perda tahun 1998. Perda tersebut bertujuan melarang aktivitas tindakan prostitusi dan menutup kawasan kompleks. Dari Perda tersebut berisi pemberantasan pelacuran di Kotamadya Kediri.

Seiring bergantinya tahun, aktivitas lokalisasi Semampir secara ilegal berdiri sendiri setelah dilakukan penutupan oleh pemerintah melalui Perda. Berdirinya lokalisasi secara ilegal ini perkembangan prostitusi di Semampir semakin besar. Perkembangan lokalisasi ilegal ini terlihat dari banyaknya para PSK yang berdatangan dari luar kota Kediri menuju ke kompleks Semampir. Hal dikarenakan mencari sumber penghasilan yang didapatkan di tempat lokalisasi Semampir ini sangatlah besar.

Pada akhirnya pada tahun 2016 terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota Kediri. Penggusuran ini dilakukan oleh pemerintah kota Kediri karena terdapatnya tempat prostitusi banyak menimbulkan beberapa dampak dan faktor. Dampak tersebut seperti menurunnya kualitas SDM yang disebabkan oleh pelaku prostitusi dan faktor yang ditimbulkan dari pelaku prostitusi ini terdapat penularan penyakit seperti HIV/AIDS.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang ingin disampaikan terhadap pembahasan kajian prostitusi ini lebih memfokuskan kepada lapisan masyarakat yang berada di Kota Kediri dan sekitarnya terhadap bahaya penyakit yang disebabkan oleh para pekerja prostitusi atau seseorang yang sering berganti – ganti pasangan. Dampak yang disebabkan oleh seseorang yang sering berganti – ganti pasangan atau para pekerja prostitusi cenderung terkena penyakit. Oleh karena itu dari pembahasan ini yang mengkaji prostitusi lebih mengingatkan bagi para masyarakat untuk menjaga dan melindungi keluarganya dari bahaya penyakit HIV/AIDS.

Pentingnya kesadaran seseorang perlu di tumbuhkan dari iman dan kepercayaan ajaran agamanya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan – aturan baik dari penetapan aturan norma, agama, dan adat kebiasaan yang telah ditetapkan masyarakat. Kesadaran yang dilakukan manusia hanya dirasakan ketika mereka sudah bangun dari tidurnya dan ingat atas kekhilafan dari perihal buruknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER ARSIP

- Lampiran PERDA No 26 Tahun 1998 tentang penutupan Lokalisasi Semampir.
- Sertifikat tanah Lokalisasi Semampir Milik Pemerintah Kota Kediri.
- Lampiran pungutan pajak Retribusi Daerah tentang biaya Sewa Lahan Lokalisasi Semampir.
- Surat Walikota Kediri tentang Himbauan Pengosongan Komplek Lokalisasi Semampir.
- Lampiran Struck Pemberian bantuan sosial terhadap warga yang terdampak dengan biaya ganti rugi bangunan.
- Lampiran mengenai keputusan hasil rapat terkait penanganan lokalisasi Semampir.

B. Sumber Buku

- A.S.Alam. 1984. *Pelacurandan Pemerasan: Studi Sosiologis tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- B. Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Endang Sulistyanyingsih. 1997. *Sejarah dan Perkembangan Prostitusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- G.W. Bawengan. 1977. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Haryoto Kunto. *Nyi Dampri: De Bloem Van Kebon Kelapa*. Majalah Matra
- Kartini Kartono. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartini Kartono. 2002. *Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Koenjoro. 2004. *Tutur dari Seorang Pelacur*. Cet.1. Yogyakarta: Tinta.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mitachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Syam. 2010. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*, Yogyakarta: LkiS
- Peter Boomgard. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Jakarta: Djambatan-KITLV
- Soedjono D. 1977. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusantara.
- Sugiarti. 2008. *Wanita P Surabaya: Lokalisasi Tambakrejo, Bangunrejo, Kremil, dan Sidoresmo Tahun 1953-1974*. Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya Unair.
- T., Hull, Sulistyarningsih, dan Jones, G.W. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*. Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation. Jakarta. 1997.
- Tjahjo Purnomo, Ashadi Siregar. 1983. *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*. Jakarta: PT Graffiti Pers.
- W.A Bonger. 1954. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Wirawan Sarwono, Sarlito. 2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C. WAWANCARA

- Bu Dewi Sartika selaku mantan Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, dan selaku tim dari pemerintahan kota Kediri yang menangani kasus pelacuran di Lokalisasi Semampir Kota Kediri.
- Bapak Zilus Kurniadi selaku pegawai di Dinas Sosial Kota Kediri, dan selaku tim pembantu dari pemerintahan Kota Kediri yang menangani kasus pelacuran di Lokalisasi Semampir Kota Kediri
- Mbah H. Sapto Darmo selaku mantan pensiun dari pegawai perangkat desa dari kelurahan Semampir. Beliau mengetahui peristiwa keberadaan pelacuran di Kota Kediri yang masih liar pada tahun 1960 hingga sampai menuju ke lokalisasi Semampir.
- Bapak Ustad Agus Karwiyanto selaku Ketua RW 05 yang berada di lokalisasi Semampir. Beliau juga memangku RT lokalisasi semampir di RT 29 dan RT 30 yang terkena dampak pengusuran, Serta memangku warga RT 31 dan RT 32 yang masih ada di sebelah lahan bekas lokalisasi Semampir.
- Bapak Markus Santoso Selaku Ketua RT 32 yang bersebelahan dengan bekas lahan lokalisasi, beliau mengetahui awal keberadaan serta aktivitas warga lokalisasi semampir termasuk para PSKnya yang berada di RT 29 dan RT 30.
- Bu Endang Sri Utami, selaku warga di RT 32 yang tinggal di sebelah lokalisasi, beliau mempunyai bangunan yang berada di lokalisasi semampir dan juga pernah mendirikan usaha di tempat lokalisasi berupa

penyewaan tempat karaoke, serta penyewaan penginapan di lokalisasi Semampir. Beliau kelahiran 1 Juni 1966 dan Selaku warga lokalisasi yang memiliki bangunan yang terdampak pada pengusuran di tahun 2016.

- Mbak Rina, Selaku Petugas Satpol PP, beliau menangani kasus eksekusi kompleks Eks-Lokalisasi Semampir dan menangani para Pekerja Seks komersial untuk di lakukan pembinaan.
- Bapak Endro Laksono selaku pegawai Polres Kediri Kota bagian Intelkam serta personil yang lainnya yang membantu menangani eksekusi Eks-Lokalisasi Semampir serta mencegah aksi warga lokalisasi semampir yang melakukan pembelaan terhadap bangunan mereka.

